



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LPPD Tahun 2025. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-2.1.7-109 Tahun 2026 Tanggal 27 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”**.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, Maret 2026

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



HIDAYAT ARSANI

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	I-1
b. Data Geografis Wilayah.....	I-1
c. Jumlah Penduduk.....	I-11
d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi)...	I-13
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-14
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-21
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-24
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I-24
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-25
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-28
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-45
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-67
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-3

2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-10
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-12
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	III.1
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan...	III-1
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi.....	III-2
3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III-2
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	III-3
3.1.1	Target Kinerja.....	III-3
3.1.2	Realisasi.....	III-8
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-37
3.2.1	Target Kinerja.....	III-37
3.2.2	Realisasi.....	III-37
3.3	Permasalahan dan Kendala.....	III-37
3.4	Saran dan Tindak Lanjut.....	III-38
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
4.1.3	Realisasi.....	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	IV-4
4.1.5	Dukungan Personil.....	IV-10
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-10
4.2	Urusan Kesehatan.....	IV-10
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-12

4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-11
4.2.3	Realisasi.....	IV-12
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	IV-14
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV-15
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-15
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-15
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-15
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-16
4.3.3	Realisasi.....	IV-16
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	IV-18
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-20
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-20
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-20
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-20
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-21
4.4.3	Realisasi.....	IV-21
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-23
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-25
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-25
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-25
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-25
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-25
4.5.3	Realisasi.....	IV-26
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-27
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-30
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-30
4.6	Urusan Sosial.....	IV-30
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-30

4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-31
4.6.3	Realisasi.....	IV-33
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-36
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-38
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-39
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV-40
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-40
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan.....	IV-46
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-46
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-47
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-47
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial.....	IV-48
BAB V	PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

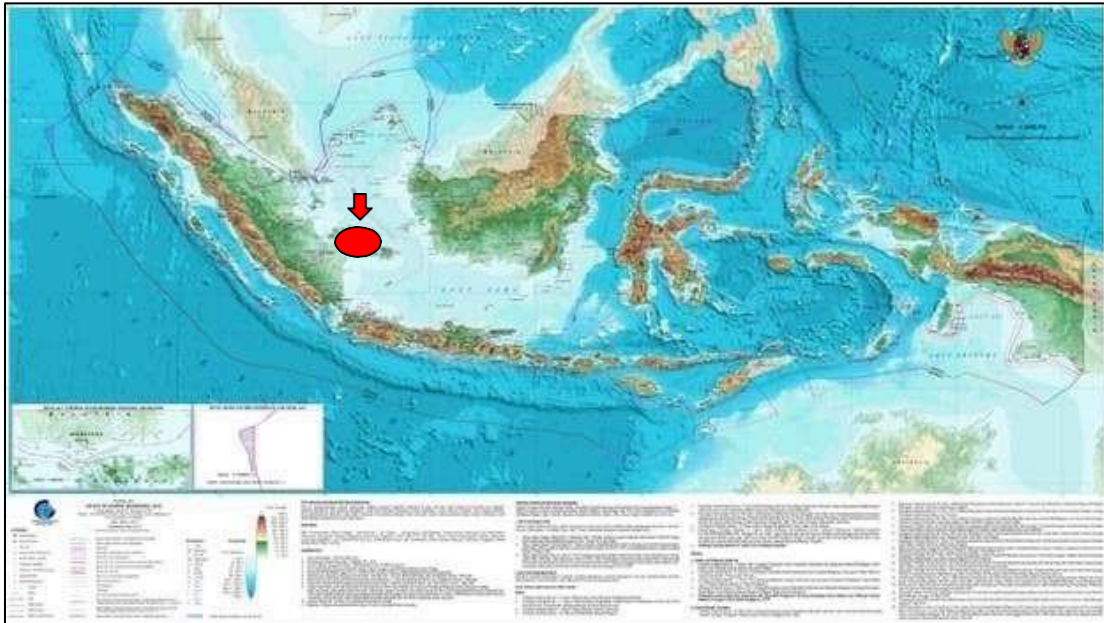
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Beberapa tahun kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di Wilayah Barat Indonesia, provinsi ini berada di antara pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menjadikannya bagian penting dari jalur pelayaran nasional dan internasional. Secara astronomis, Bangka Belitung terletak antara 104°50' hingga 109°30' Bujur Timur dan 0°50' hingga 4°10' Lintang Selatan. Letaknya berada di timur Pulau Sumatera dan dikelilingi oleh perairan Laut Natuna, Selat Karimata, serta Laut Cina Selatan. Kondisi ini tidak hanya mendukung peran provinsi dalam konektivitas maritim, tetapi juga memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor maritim.

Secara administratif, wilayah ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau kecil lainnya yang sebagian besar belum berpenghuni. Bentuk kepulauan ini turut memperkuat karakter maritim Bangka Belitung dan menjadi ciri khas utama provinsi ini. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut :

Gambar I.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Salah satu keunggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kedekatannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yakni jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, hingga ke Samudera Hindia melalui Selat Sunda. Selain itu, terdapat pula jalur alternatif, yaitu Cabang IA yang menghubungkan Selat Singapura dengan Laut Natuna. Posisi Bangka Belitung yang berada diantara Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, serta dekat dengan Semenanjung Malaysia dan Singapura, menjadikan provinsi ini sebagai titik penting dalam konektivitas pelayaran nasional dan regional.

Letak ini memberikan peluang bagi pengembangan aktivitas perdagangan, transportasi laut, dan sektor maritim lainnya. Konektivitas yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di bidang perikanan, kelautan, dan logistik. Selain itu, keberadaan pelabuhan yang strategis di wilayah ini memungkinkan peningkatan distribusi barang dan hasil sumber daya alam ke berbagai daerah. Jika didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, posisi geografis ini dapat terus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan.

Gambar I.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber: Peta ALKI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002

Namun demikian, jika terjadi ketegangan geopolitik di kawasan, posisi Bangka Belitung yang berada di jalur pelayaran internasional dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Potensi konflik di Laut Cina Selatan, termasuk meningkatnya aktivitas militer negara-negara besar, bisa berdampak pada stabilitas wilayah sekitar. Di sisi lain, tingginya intensitas lalu lintas di Selat Malaka juga dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan maritim. Dalam menghadapi kemungkinan tersebut, penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan wilayah laut dan menjalin kerja sama keamanan regional guna menjaga kestabilan dan keselamatan pelayaran.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, awalnya terdiri dari 2 kabupaten (Bangka dan Belitung) dan 1 kota (Pangkalpinang). Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, dilakukan pemekaran menjadi 6 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten terluas adalah Bangka Selatan (3.607,08 km²), sedangkan yang terkecil adalah Kota Pangkalpinang (89,40 km²). Total luas wilayah provinsi ini 81.725,06 km², terdiri dari 16.424,06 km² daratan (20,10%) dan 65.301,00 km² lautan (79,90%).

Gambar I.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel I.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	Sungailiat	2.950,68	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.820,61	6	6	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.155,77	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.293,61	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.506,91	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	89,40	7	42	0

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			81.725,06	47	84	309
	Luas Daratan		16.424,06			
	Luas Laut		65.301,00			

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2024 (diolah)

Kajian hidrologi menunjukkan bahwa wilayah Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas perairan laut dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut kurang dari 30 meter. Terdapat dua jenis perairan di wilayah ini, yaitu perairan terbuka dan semi tertutup. Perairan terbuka terdapat di utara, timur, dan selatan Pulau Bangka serta di sekitar Pulau Belitung. Sementara itu, perairan semi tertutup berada di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di utara Pulau Bangka.

Gambar I.2
Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Verifikasi SPDP Biro Pemerintahan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

Survey Pemuktahiran Data Pulau (SPDP) dilakukan pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117/2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 507 Pulau yang terdiri dari 2 (dua) Pulau Besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta 505 Pulau-Pulau kecil yang tersebar di Kawasan pesisir dan laut. Hal ini kemudian dilakukan evaluasi melalui survey lapangan pada tahun 2023 oleh Tim SPDP dengan melibatkan pemerintah daerah terkait dan nelayan setempat. Verifikasi hasil survey dilakukan pada tahun 2024 dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi dan Geospasial

(BIG) serta TNI Angkatan Laut (LANAL). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dari 505 pulau-pulau kecil tersebut terdapat 55 Pulau Kecil yang telah dihapus maupun diubah statusnya. Pulau yang dihapus dikarenakan tenggelam dan/atau menyatu dengan daratan sejumlah 17 Pulau, diubah statusnya menjadi unsur karang sebanyak 18 Pulau, unsur gosong sebanyak 13 Pulau, unsur mangrove sebanyak 5 Pulau, dan unsur tanjung sebanyak 2 Pulau. Selain itu, dalam evaluasi diusulkan 49 unsur pulau dan telah disetujui. Hasil verifikasi ini telah disahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2.138 Tahun 2025 yang ditampilkan pada Tabel I.3 berikut.

Tabel I.3
Sebaran Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Kab/ Kota	BP	TB	Jumlah	Sengketa*
Bangka	1	63	6	26
Bangka Barat	-	82	8	
Bangka Selatan	8	55	6	
Bangka Tengah	6	19	2	
Belitung	11	143	15	
Belitung Timur	7	104	11	
Jumlah	33	466	49	26
				525 Pulau Kecil*
Keterangan: BP : Pulau Berpenghuni; TBP : Pulau Tidak Berpenghuni; Sengketa : Gugusan Pulau Tujuh dan Pulau Dua (26 Pulau) sengketa dengan Kep. Riau.				

Sumber: Kepmendagri Nomor 300.2.2-2.138 Tahun 2025

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2.138 Tahun 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 501 Pulau yang terdiri dari 2 Pulau Besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung dan 499 Pulau-Pulau Kecil dengan rincian 33 Pulau Kecil Berpenghuni dan 466 Pulau Kecil Tidak Berpenghuni. Jumlah tidak termasuk 26 Pulau Sengketa yang saat ini kepemilikannya berada di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut merupakan sebaran pulau-pulau kecil berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.4
Data Sebaran Pulau-Pulau Kecil Berpenghuni Tahun 2025

No	Kab.	Kec.	Desa/ Kel	Nama Pulau	X_DD	Y_DD	Listrik	Kawasan
1	Bangka	Belinyu	Romodong Indah	Mentigi (Penyusuk)	105.68945300	-1.52832800	Swadaya	APL
2	Belitun	Membalo	Lassar	Betangan	107.5260020	-2.98278400	Swadaya	APL
3	Belitun	Selat	Pulau	Buntar	107.3677780	-3.06054000	PLN	APL
4	Belitun	Selat	Pulau	Gersik	107.2713500	-3.00055600	PLN	APL
5	Belitun	Badau	Pegantunga	Kelebong	107.5340120	-2.96193800	Swadaya	APL
6	Belitun	Selat	Pulau	Kuil	107.1321800	-2.98444400	PLN	APL
7	Belitun	Sijuk	Tanjung Binga	Lengkuas	107.61954600	-2.53693000	Swadaya	APL

No	Kab.	Kec.	Desa/ Kel	Nama Pulau	X_DD	Y_DD	Listrik	Kawasan
8	Belitung	Selat Nasik	Petaling, Suak Gual,	Mendanau	107.42350000	-2.87822000	PLN	APL
9	Belitung	Selat	Pulau	Kalambau	107.1700100	-3.02864000	Swadaya	APL
10	Belitung	Badau	Pegantunga	Rengit	107.5219440	-2.94304000	PLN	APL
11	Belitung	Membalo	Pulau Seliu	Seliuk	107.5297220	-3.22017000	PLN	APL
12	Belitung	Membalo	Pulau Sumedang	Semedang	107.2109390	-3.31802600	PLN	APL
13	Basel	Pulau Besar	Batu Betumpang	Besar	106.1422220	-2.87777800	Swadaya	APL
14	Basel	Kepulauan	Celagen	Celagen	107.0152780	-2.87305600	PLN	APL
15	Basel	Toboan	Toboan	Dapur	106.5155500	-3.13305000	Swadaya	APL
16	Basel	Lepar	Kumbung	Kelapan	106.8419440	-2.84972200	PLN	APL
17	Basel	Lepar	Tanjung Sangkar, Penutuk, Tanjung Labu,	Lepar	106.8102780	-2.95583300	PLN	APL
18	Basel	Lepar	Penutuk	Panjang	106.6936110	-2.96194400	PLN	APL
19	Basel	Kepulauan	Pongok	Pongok	107.0569440	-2.86444400	PLN	APL
20	Basel	Lepar	Penutuk	Tinggi	106.7044440	-2.98666700	PLN	APL
21	Bateng	Koba	Kurau	Gusungasa	106.3527780	-2.25888900	Swadaya	APL
22	Bateng	Koba	Kurau	Ketawai	106.3272220	-2.26583300	Swadaya	APL
23	Bateng	Koba	Kurau (Barat)	Bebuar	106.4455560	-2.28361100	Swadaya	APL
24	Bateng	Sungai Selan	Tanjung Pura	Nangka	105.7930560	-2.40888900	PLN	APL
25	Bateng	Sungai Selan	Tanjung Pura	Pelepess	105.7513890	-2.38805600	Swadaya	APL
26	Bateng	Pangkalan Baru	Kebintik	Semujuur	106.2961110	-2.15555600	Swadaya	APL
27	Belim	Manggar	Pulau Buku Limau	Bukulimau	108.4030560	-2.81194400	PLN	APL
28	Belim	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Ketapang	107.9605560	-3.41305600	Swadaya	APL
29	Belim	Gantung	Selinsing	Long	108.4611110	-3.32472200	Swadaya	APL
30	Belim	Manggar	Kurnia	Mata Satu	108.2778652	-2.85482550	PLN	APL
31	Belim	Manggar	Pulau Buku Limau	Pesemut	108.8469440	-2.49500000	Swadaya	APL
32	Belim	Gantung	Limbongan	Sekepar	108.2447220	-3.14944400	Swadaya	APL
33	Belim	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	Batun (Putih)	108.0665550	-3.80100500	Swadaya	APL

Sumber: Hasil Evaluasi Tim SPDP Biro Pemerintahan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025

I. Kondisi Topografi

Pulau Bangka didominasi oleh dataran rendah di wilayah pesisir dan perbukitan di wilayah tengah dan wilayah selatan dengan titik tertinggi di Gunung Maras. Sementara itu, Pulau Belitung memiliki karakteristik topografi perbukitan dan lembah sungai serta bukit-bukit granit yang ditemukan di beberapa tempat. Secara garis besar, kondisi topografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Dataran Rendah:
 - Sebagian besar wilayah provinsi ini terdiri dari dataran rendah yang membentang di sepanjang pesisir pantai.
 - Dataran rendah ini umumnya digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman.
2. Perbukitan dan Pegunungan Rendah:
 - Di beberapa bagian, terutama di Pulau Bangka dan Belitung, terdapat perbukitan dan pegunungan rendah.
 - Gunung Maras di Pulau Bangka merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian sekitar 699 meter di atas permukaan laut.
 - Bukit-bukit ini terdiri dari batuan granit yang sering kali muncul di permukaan sebagai formasi batuan yang mencolok.
3. Pantai dan Pesisir:
 - Kepulauan Bangka Belitung memiliki garis pantai yang panjang dengan banyak teluk, tanjung, dan pantai berpasir putih.
 - Sejumlah pantai terdapat batu-batu granit besar yang menjadi ciri khas daerah antara lain Pantai Tanjung Tinggi di Belitung.
4. Hutan dan Rawa:
 - Daerah hutan dan rawa terdapat di dataran rendah dan dekat dengan aliran sungai.
 - Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir dan delta sungai yang berfungsi sebagai perlindungan alami pantai dan habitat spesies mangrove.
5. Sungai dan Kolong:
 - Banyak sungai yang mengalir dari perbukitan menuju pantai yang menciptakan lembah-lembah sungai yang subur.
 - Kegiatan penambangan timah membentuk lubang-lubang bekas tambang yang disebut kolong.
6. Lanskap Pertambangan:
 - Aktivitas pertambangan, terutama penambangan timah, telah mengubah beberapa bagian topografi daratan terutama dalam hal membentuk kolong yang berair jernih dan berwarna biru kehijauan.

II. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan variasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26,70°C hingga 28,92°C, dengan suhu maksimum tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 36,80°C dan suhu minimum terendah pada tahun 2020 sebesar 18,20°C. Tingkat kelembaban relatif rata-rata berada pada kisaran 79,26%–87,76%, dengan kelembaban maksimum selalu mencapai 100% setiap tahunnya, sementara kelembaban minimum terendah tercatat pada

tahun 2023 sebesar 35%. Curah hujan tahunan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 tercatat 2.355,3 mm, meningkat menjadi lebih dari 3.000 mm pada 2021 dan 2022, kemudian menurun drastis pada 2023 menjadi 1.710 mm, sebelum kembali meningkat pada 2024 sebesar 2.880,17 mm. Jumlah hari hujan juga menunjukkan tren serupa, dari 134 hari pada 2020 meningkat menjadi 234 hari pada 2021–2022, menurun menjadi 200 hari pada 2023, lalu melonjak signifikan hingga mencapai 311 hari pada 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan iklim yang dinamis, dengan pola curah hujan yang fluktuatif dan intensitas hari hujan yang semakin meningkat terutama pada tahun 2024. Kondisi ini berimplikasi pada sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga memerlukan strategi adaptasi terhadap variabilitas iklim dan potensi risiko bencana hidrometeorologi.

Tabel I.5
Keadaan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Keadaan Iklim	2020	2021	2022	2023	2024
Suhu (°C)					
Minimum	18,20	21,60	21,60	20,10	22,03
Rata-rata	26,70	28,20	28,10	28,92	27,49
Maksimum	36,40	34,40	34,60	36,80	35,90
Kelembaban (%)					
Minimum	40,00	51,00	55,00	35,00	57,00
Rata-rata	87,00	82,30	83,30	79,26	87,76
Maksimum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Curah Hujan (mm)	2.355,30	3.012,90	3.026,7	1.710,00	2.880,17
Hari Hujan (hari)	134,00	234,00	234,00	200,00	311,33

Sumber: BPS - Bangka Belitung Dalam Angka 2023-2025

Tabel I.6
**Pengamatan Rata-Rata Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Tahun 2021-2024**

Unsur Iklim	2021	2022	2023	2024
Suhu (°C)	28,20	28,70	28,92	27,49
Kelembaban (%)	82,70	83,30	79,26	87,76
Kecepatan Angin (m/det)	3,30	3,10	3,41	1,95
Tekanan Udara (mbar)	1.007,90	1.007,40	1.008,41	1.006,38
Jumlah Curah Hujan (mm)	3.012,90	3.026,70	1.710,00	2.880,17
Jumlah Hari Hujan (hari)	234,00	234,00	200,00	311,33
Penyinaran Matahari (%)	4,50	3,70	3,70	4,39

Sumber: BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Iklim tropis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh angin musim dan mengalami bulan basah selama 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama 4 bulan yang mempengaruhi pola maupun siklus melaut para nelayan. Terdapat tiga titik

stasiun pengamatan unsur iklim, yaitu Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, Stasiun Meteorologi H.A.S. Hanandjoeddin, dan Stasiun Klimatologi Koba. Menurut Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu udara rata-rata di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 berkisar di angka 28,92°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk rata-rata kelembaban udara, jumlah curah hujan, rata-rata suhu udara, penyinaran matahari dan kelembaban udara, sebagaimana pada Tabel 2.5.

III. Kondisi Geologi

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh formasi Tanjung Genting yang sebesar 30,63% dari total luas, diikuti oleh Alluvium sebesar 25,38%, Granit Klabat sebesar 15,22%, Kelapa kampit sebesar 14,96% dan formasi Penyambung Diabase dan Siantu yang proporsi keduanya sebesar 0,02%. Formasi Tanjung Genting paling luas berada di Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 151.398,8 Ha, formasi Alluvium paling luas terletak di Kabupaten Bangka Selatan dengan luas 121.871,4 Ha, dan formasi Klabat Granit paling luas terletak di Kabupaten Bangka Selatan seluas 74.552,6 Ha. Selain itu, formasi Penyambung Diabase hanya terletak di Kabupaten Bangka Barat dengan luas 317 Ha dan formasi Siantu hanya terletak di Kabupaten Belitung dengan luas 259,7 Ha.

Formasi batuan geologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Tanjung Genting formation (511.331,7), Aluvium (423.653,4) dan Klabat Granite (253.992,4). Berdasarkan wilayah, formasi batuan geologi tanjung genting formation banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan (151.398,8) dan Bangka Barat (140.853,8), formasi batuan geologi Aluvium banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan (121.871,4) dan Kabupaten Bangka (73.958,4), dan formasi batuan geologi Klabat Granite banyak terdapat di Kabupaten Bangka Selatan (74.552,6) dan Bangka Barat (71.409,6).

IV. Kondisi Hidrologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kondisi hidrologi yang dipengaruhi oleh keberadaan sumber air, baik air permukaan maupun air tanah, sebagai berikut:

1. Sungai dan Aliran Air:

- Provinsi ini memiliki banyak sungai besar dan kecil yang mengalir dari daerah pegunungan menuju pantai.
- Beberapa sungai utama di Pulau Bangka adalah Sungai Baturusa, Sungai Menduk, Sungai Mendo, dan Sungai Perimping.
- Di Pulau Belitung, sungai-sungai utama termasuk Sungai Lenggang, Sungai Kuale dan Sungai Cerucuk.

2. Danau dan Waduk:

- Danau dan waduk di Bangka Belitung umumnya terbentuk akibat aktivitas penambangan timah yang telah meninggalkan kolong yang terisi air.

3. Kualitas Air:

- Kualitas air bervariasi, tergantung pada sumber air dan aktivitas di sekitarnya.

- Aktivitas penambangan mempengaruhi kualitas air sungai dalam hal meningkatkan *total solid suspended* sehingga mengakibatkan sedimentasi sehingga diperlukan konservasi untuk memastikan ketersediaan sanitasi aman bagi penduduk setempat.
- 4. Air Tanah:
 - Air tanah merupakan sumber air penting bagi penduduk terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air permukaan.
 - Sumur bor dan sumur gali umum digunakan untuk mengakses sumber air tanah untuk keperluan sehari-hari.
- 5. Potensi Banjir:
 - Curah hujan tinggi pada saat musim hujan menyebabkan daerah-daerah tertentu rentan banjir, terutama di daerah dataran rendah dan dekat sungai.
 - Sistem drainase dan mitigasi banjir penting untuk mengurangi dampak negatif dari banjir musiman.
- 6. Pengelolaan Sumber Daya Air:
 - Pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus pada konservasi, pengendalian pencemaran, dan penyediaan air minum.
 - Program reboisasi dan penghijauan di hulu sungai bertujuan untuk menjaga kuantitas dan kualitas air.

V. Wilayah Rawan Bencana

Daftar rawan bencana mengacu pada kajian KLHS RPJPD yang terdiri dari bencana penting, angin kencang, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, dan gelombang pasang, serta kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang sering muncul adalah banjir, diikuti oleh angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, dan angin kencang, serta petir.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperbaharui tanggal 26 Februari 2026 terkait Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel I.7 berikut :

Tabel I.7
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk
Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	350,00	1,23	22,30	116,00	105,30
Belitung	195,70	1,26	12,47	86,00	103,10
Bangka Barat	221,60	1,40	14,12	78,00	106,10
Bangka Tengah	216,50	1,48	13,79	96,00	106,50
Bangka Selatan	213,70	1,32	13,61	59,00	105,90
Belitung Timur	135,90	1,18	8,66	52,00	106,30
Kota Pangkal Pinang	236,40	1,38	15,06	2.262,00	102,40
Kepulauan Bangka Belitung	1.569,70	1,32	100,00	94,00	105,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebanyak 1.569.700,- juta jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 1.550.800,- jiwa, penduduk Bangka Belitung bertambah sebanyak 18.900 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) tahun 2025 yaitu perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,00 (*setiap 100 penduduk perempuan di wilayah Bangka Belitung, terdapat 105 penduduk laki-laki*). Kota Pangkalpinang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 236.400 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 135.900 jiwa yang juga tersebar di 7 kecamatan.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 berdasarkan Tabel I.7 diatas rata-rata mencapai 94,00 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Pangkalpinang dengan kepadatan penduduk sebesar 2.262,00 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah ada di Kabupaten Belitung Timur sebesar 52,00 jiwa/km².

Berdasarkan komposisinya, persentase penduduk usia produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (15–64 tahun) terhadap total populasi pada tahun 2025 sebesar 69,70 persen, sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) tercatat sebesar 30,30 persen. Persentase penduduk usia produktif tampak lebih besar dari persentase

penduduk usia nonproduktif, ini menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada era bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Komposisi penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel I.8 berikut :

Tabel I.8
Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	67,2	64,5	131,7
5-9	62,7	59,8	122,5
10-14	59,8	57	116,8
15-19	63,9	60,3	124,2
20-24	65,2	61,5	126,7
25-29	64,4	61,7	126,1
30-34	63,7	60,7	124,4
35-39	64,3	60,5	124,8
40-44	61,5	57,5	119
45-49	57,5	53,1	110,6
50-54	50,6	46,6	97,2
55-59	40,8	38,2	79
60-64	31,8	30,4	62,2
65-69	23,2	23,1	46,3
70-74	15,3	15,9	31,3
75+	12,2	14,9	27,1
Jumlah/Total	804,2	765,6	1569,8

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan

kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.9 di bawah ini.

Tabel 1.9
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2025)

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat daerah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan unit kerja perangkat daerah sebanyak 152 (seratus lima puluh dua)

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan				Jumlah Pegawai
		Struktural	Pelaksana	Fungsional		
				Kesehatan	Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sekretariat Daerah	6	-	-	-	6
	- Biro Pemerintahan	3	24	-	10	37
	- Biro Kesejahteraan Rakyat	1	19	-	9	29
	- Biro Hukum	3	11	-	17	31
	- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	19	-	12	33
	- Biro Pengadaan Barang/Jasa	4	9	-	32	45
	- Biro Organisasi	5	14	-	8	27
	- Biro Umum	5	61	-	18	84
	- Biro Administrasi Pimpinan	4	1	-	-	5
2	Sekretariat DPRD	3	62	-	24	89
3	Dinas Pendidikan	6	37	-	21	64
	- SLBN Pangkalpinang	-	5	-	25	30
	- SMAN 1 Pangkalpinang	-	2	-	51	53
	- SMAN 2 Pangkalpinang	-	2	-	46	48
	- SMAN 3 Pangkalpinang	-	2	-	47	49
	- SMAN 4 Pangkalpinang	-	5	-	41	46
	- SMKN 1 Pangkalpinang	-	4	-	52	56
	- SMKN 2 Pangkalpinang	-	1	-	82	83
	- SMKN 3 Pangkalpinang	-	4	-	50	54

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan				Jumlah Pegawai
		Struktural	Pelaksana	Fungsional		
				Kesehatan	Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- SMKN 4 Pangkalpinang	-	4	-	47	51
	- SMKN 5 Pangkalpinang	-	3	-	26	29
	- Slbn Koba Bangka Tengah	-	1	-	19	20
	- SMAN 1 Koba Bangka Tengah	-	1	-	34	35
	- SMAN 1 Lubuk Besar Bangka Tengah	-	4	-	26	30
	- SMAN 1 Namang Bangka Tengah	-	1	-	29	30
	- SMAN 1 Pangkalan Baru Bangka Tengah	-	1	-	33	34
	- SMAN 1 Sungaiselan Bangka Tengah	-	-	-	19	19
	- SMAN 1 Simpang Katis Bangka Tengah	-	-	-	11	11
	- SMAN 2 Sungaiselan Bangka Tengah	-	5	-	34	39
	- SMAN Olahraga Muhammad Noer Pangkalan Baru Bangka Tengah	-	3	-	16	19
	- SMKN 1 Koba Bangka Tengah	-	1	-	41	42
	- SMKN 1 Pangkalan Baru Bangka Tengah	-	1	-	53	54
	- SMKN 1 Simpang Katis Bangka Tengah	-	4	-	54	58
	- SMKN 1 Sungaiselan Bangka Tengah	-	-	-	23	23
	- SMKN 2 Koba Bangka Tengah	-	-	-	39	39
	- SLBN Sungailiat Bangka	-	2	-	19	21
	- SMAN 1 Bakam Bangka	-	-	-	18	18
	- SMAN 1 Belinyu Bangka	-	1	-	31	32
	- SMAN 1 Mendo Barat Bangka	-	1	-	27	28
	- SMAN 1 Merawang Bangka	-	4	-	26	30
	- SMAN 1 Pemali Bangka	-	2	-	49	51
	- SMAN 1 Puding Besar Bangka	-	1	-	24	25
	- SMAN 1 Riau Silip Bangka	-	-	-	26	26
	- SMAN 1 Sungailiat Bangka	-	6	-	50	56
	- SMAN 2 Mendo Barat Bangka	-	-	-	17	17
	- SMAN 2 Puding Besar Bangka	-	-	-	15	15
	- SMAN 2 Sungailiat Bangka	-	3	-	13	16
	- SMKN 1 Bakam Bangka	-	-	-	23	23
	- SMKN 1 Belinyu Bangka	-	-	-	27	27
	- SMKN 1 Mendo Barat Bangka	-	4	-	25	29
	- SMKN 1 Sungailiat Bangka	-	1	-	57	58
	- SMKN 2 Sungailiat Bangka	-	1	-	41	42
	- SLBN Toboali Bangka Selatan	-	-	-	14	14
	- SMAN 1 Air Gegas Bangka Selatan	-	-	-	37	37
	- SMAN 1 Kepulauan Pongok Bangka Selatan	-	8	-	13	21
	- SMAN 1 Lepar Pongok Bangka Selatan	-	3	-	15	18
	- SMAN 1 Payung Bangka Selatan	-	5	-	29	34
	- SMAN 1 Pulau Besar Bangka Selatan	-	1	-	15	16
	- SMAN 1 Simpang Rimba Bangka Selatan	-	1	-	27	28
	- SMAN 1 Toboali Bangka Selatan	-	2	-	46	48
	- SMAN 2 Toboali Bangka Selatan	-	-	-	30	30
	- SMAN 3 Toboali Bangka Selatan	-	-	-	14	14
	- SMKN 1 Air Gegas Bangka Selatan	-	-	-	29	29
	- SMKN 1 Payung Bangka Selatan	-	2	-	29	31
- SMKN 1 Pulau Besar Bangka Selatan	-	4	-	13	17	
- SMKN 1 Simpang Rimba Bangka Selatan	-	4	-	17	21	
- SMKN 1 Toboali Bangka Selatan	-	2	-	43	45	

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan				Jumlah Pegawai
		Struktural	Pelaksana	Fungsional		
				Kesehatan	Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- SMKN 1 Tukak Sadai Bangka Selatan	-	3	-	21	24
	- SLBN Muntok Bangka Barat	-	4	-	13	17
	- SMAN 1 Jebus Bangka Barat	-	6	-	27	33
	- SMAN 1 Kelapa Bangka Barat	-	7	-	35	42
	- SMAN 1 Muntok Bangka Barat	-	1	-	36	37
	- SMAN 1 Parittiga Bangka Barat	-	6	-	24	30
	- SMAN 1 Simpang Teritip Bangka Barat	-	3	-	26	29
	- SMAN 1 Tempilang Bangka Barat	-	3	-	22	25
	- SMKN 1 Kelapa Bangka Barat	-	2	-	30	32
	- SMKN 1 Muntok Bangka Barat	-	4	-	36	40
	- SMKN 1 Parittiga Bangka Barat	-	2	-	41	43
	- SMKN 1 Simpang Teritip Bangka Barat	-	4	-	17	21
	- SMKN 1 Tempilang Bangka Barat	-	2	-	20	22
	- SLBN Tanjung Pandan Belitung	-	3	-	15	18
	- SMAN 1 Membalong Belitung	-	3	-	21	24
	- SMAN 1 Sijuk Belitung	-	3	-	29	32
	- SMAN 1 Tanjung Pandan Belitung	-	3	-	47	50
	- SMAN 2 Tanjung Pandan Belitung	-	3	-	39	42
	- SMKN 1 Badau Belitung	-	-	-	31	31
	- SMKN 1 Selat Nasik Belitung	-	5	-	12	17
	- SMKN 1 Sijuk Belitung	-	2	-	19	21
	- SMKN 1 Tanjung Pandan Belitung	-	4	-	45	49
	- SMKN 2 Tanjung Pandan Belitung	-	-	-	46	46
	- SMKN 3 Tanjung Pandan Belitung	-	1	-	33	34
	- SLBN Manggar Belitung Timur	-	2	-	19	21
	- SMAN 1 Damar Belitung Timur	-	2	-	25	27
	- SMAN 1 Gantung Belitung Timur	-	2	-	46	48
	- SMAN 1 Kelapa Kampit Belitung Timur	-	2	-	35	37
	- SMAN 1 Manggar Belitung Timur	-	3	-	43	46
	- SMAN 1 Simpang Pesak Belitung Timur	-	-	-	25	25
	- SMKN 1 Dendang Belitung Timur	-	3	-	16	19
	- SMKN 1 Kelapa Kampit Belitung Timur	-	2	-	25	27
	- SMKN 1 Manggar Belitung Timur	-	1	-	46	47
	- SMKN 1 Simpang Renggiang Belitung Timur	-	2	-	16	18
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Pangkalpinang Dan Bangka Tengah)	4	6	-	8	18
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Bangka)	4	8	-	10	22
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bangka Selatan)	4	4	-	4	12
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Bangka Barat)	3	3	-	3	9
	- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V (Belitung dan Belitung Timur)	4	11	-	6	21
	- UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	4	7	-	2	13
- UPTD Pendidikan Inklusi	4	-	4	-	8	
4	Dinas Kesehatan	14	49	58	10	131
	- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	4	6	20	-	30
	- UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	10	51	293	23	377

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan				Jumlah Pegawai
		Struktural	Pelaksana	Fungsional		
				Kesehatan	Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Dr. (H.C.) Ir. Soekarno					
	- UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah	9	37	166	12	224
	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	47	-	41	96
	- UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah	3	6	1	2	12
	- UPTD Panti Sosial Bina Serumpun	4	7	5	6	22
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	18	150	-	19	187
	- UPTD Pengawasan dan Peralatan	4	15	-	-	19
7	Satuan Polisi Pamong Praja	17	23	-	64	104
8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	7	36	-	24	67
	- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka	4	13	-	1	18
	- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	3	2	-	2	7
	- Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	4	6	-	1	11
	- Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	3	5	-	-	8
	- Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur	3	5	-	-	8
9	Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	8	57	-	24	89
	- UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung	3	8	-	-	11
10	Dinas Perhubungan	13	75	-	3	91
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	25	-	30	60
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	28	-	18	48
	- UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung	4	2	-	-	6
13	Dinas Tenaga Kerja	7	15	-	47	69
	- UPTD Balai Latihan Kerja	4	5	-	12	21
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6	25	-	17	48
	- UPTD Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4	6	-	-	10
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7	36	-	40	83
	- UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	4	8	-	7	19
	- UPTD Rumah Promosi Dan Kemasan	4	11	-	-	15
16	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	7	42	-	87	136
	- UPTD Balai Benih Pertanian	4	6	-	8	18
	- UPTD Balai Proteksi Tanaman	2	9	-	6	17
	- UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih	4	6	-	8	18
	- UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	4	3	-	9	16
17	Dinas PPPA, Dukcapil, Pengendalian Penduduk dan KB	7	22	-	15	44
	- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	3	2	-	-	5
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	8	40	-	49	97
	- UPTD Balai Pemuliaan Ikan	3	1	-	3	7

No	Perangkat Daerah	Jenis Jabatan				Jumlah Pegawai
		Struktural	Pelaksana	Fungsional		
				Kesehatan	Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	4	5	-	3	12
	- UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Batu Rusa	1	-	-	-	1
	- UPTD Kawasan Konservasi	1	-	-	-	1
19	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	6	35	-	40	81
	- UPTD Laboratorium Lingkungan	4	7	-	1	12
	- UPTD Kphp Rambat Menduyung	4	6	-	5	15
	- UPTD Kphp Jebu Bambang Antan	3	6	-	5	14
	- UPTD Kphp Bubus Panca	3	6	-	4	13
	- UPTD Kphp Sigambir Kotawaringin	4	9	-	7	20
	- UPTD Kphp Sungai Sembulan	4	5	-	7	16
	- UPTD Kphp Muntai Palas	3	4	-	7	14
	- UPTD Kphl Belantu Mendanau	3	5	-	15	23
	- UPTD Kphp Gunung Duren	4	4	-	14	22
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	22	-	40	69
21	Inspektorat Daerah	6	15	-	68	89
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6	31	-	58	95
23	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	7	26	-	39	72
24	Badan Keuangan Daerah	20	96	-	20	136
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Bangka	4	27	-	1	32
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	3	12	-	-	15
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	4	13	-	-	17
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Bangka Barat	3	13	-	-	16
	- UPT SAMSAT Wilayah Kota Pangkalpinang	4	33	-	3	40
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Belitung	4	15	-	-	19
	- UPT SAMSAT Wilayah Kabupaten Belitung Timur	4	12	-	-	16
25	Badan Penghubung Provinsi	5	25	-	1	31
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	33	-	16	55
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	18	-	11	36
28	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	1	-	-	1
JUMLAH		431	1.875	547	3.875	6.728

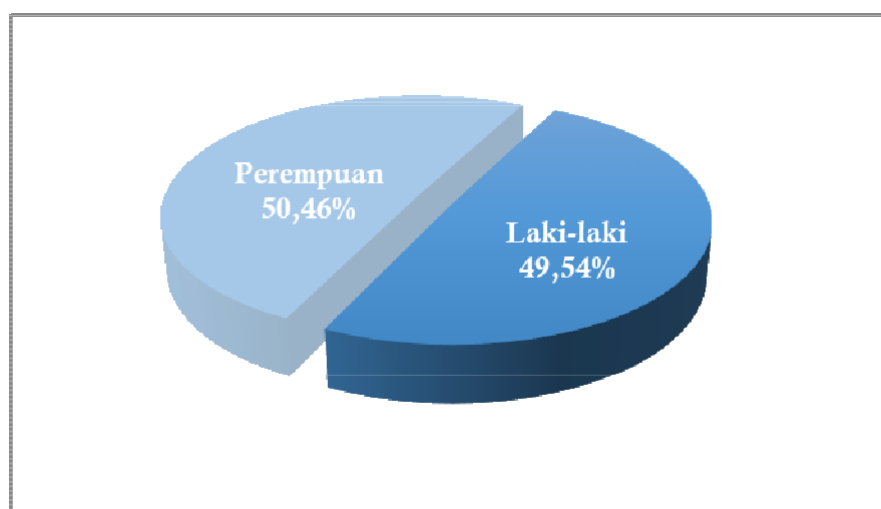
Sumber: BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2025

Berdasarkan tabel 1.5 diatas komposisi ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dari total jumlah ASN sebanyak 6.728 orang yang menduduki jabatan struktural sebanyak 431 atau 6,41%, jabatan fungsional sebanyak 4.422 atau 65,73% dan jabatan pelaksana sebanyak 1.875 atau 27,87%.

A. ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2025 dari total 6.728 orang jumlah ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 3.333 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 3.395 orang berjenis kelamin perempuan. Gambaran keadaan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Grafik I.1 berikut ini :

Grafik I.1
ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2025

B. ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

Gambaran keadaan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 berdasarkan golongan ditampilkan pada Tabel I.10 berikut ini :

Tabel I.10
ASN Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IV/e	3	
2.	IV/d	19	
3.	IV/c	117	
4.	IV/b	341	
5.	IV/a	421	
6.	III/d	1.926	
7.	III/c	652	
8.	III/b	907	
9.	III/a	347	
10.	II/d	168	
11.	II/c	169	

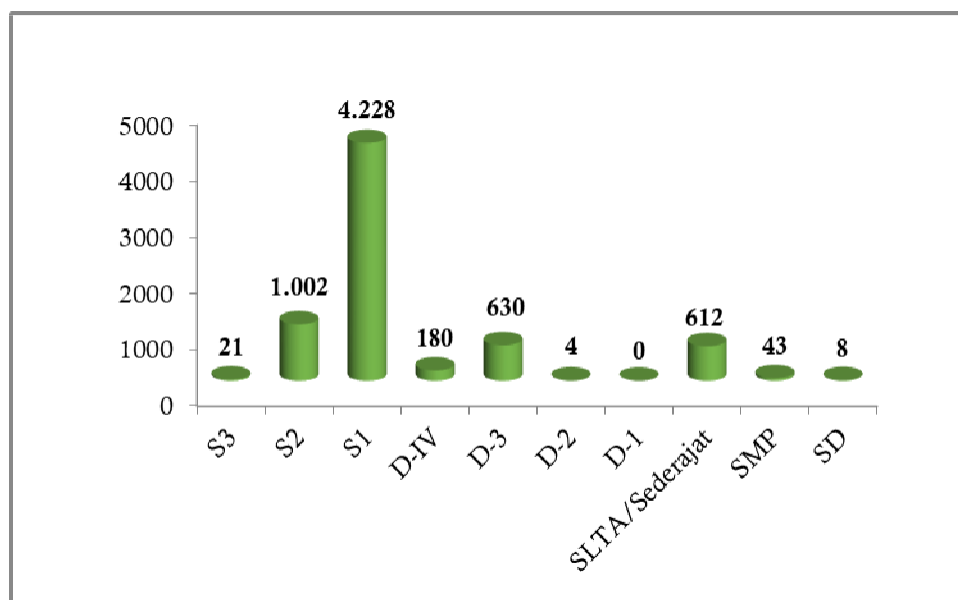
No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	II/b	2	
13.	II/a	2	
14.	I/d	0	
15.	I/c	2	
16.	I/b	0	
17.	I/a	0	
18.	X	23	
19.	IX	1.209	
20.	VII	79	
21.	V	292	
22.	XI	1	
23.	I	6	
24.	III	42	
JUMLAH		6.728	

Sumber: BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2025

C. ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran keadaan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Grafik I.2 berikut:

Grafik I.2
ASN Provinsi Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.304.056.812.947,46 dengan realisasi sebesar Rp. 2.136.506.913.492,16 atau 92,72%. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain berasal dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer;

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 diuraikan pada Tabel I.11 berikut :

Tabel I.11
Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening			Uraian	Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
4			PENDAPATAN DAERAH	2.391.677.384.389,04	2.304.056.812.947,46	2.136.576.334.242,71	92,73
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	986.551.719.389,04	919.744.470.867,46	817.307.477.165,71	88,86
4	1	01	Pendapatan Pajak Daerah	754.193.603.139,00	673.053.980.016,46	672.413.451.291,19	99,90
4	1	02	Pendapatan Retribusi Daerah	71.887.165.200,00	79.349.447.001,00	71.766.154.125,92	90,44
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.084.234.500,00	7.022.018.779,78	7.022.018.779,78	100,00
4	1	04	Lain-Lain PAD yang Sah	150.386.716.550,00	160.319.025.070,22	66.105.852.968,82	41,23
			JUMLAH PENDAPATAN	986.551.719.389,04	919.744.470.867,46	817.307.477.165,71	88,86
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	1.319.268.857.077,00	95,30
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	1.319.268.857.077,00	95,30
4	2	01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	01	Dana Bagi Hasil (DBH)	125.571.059.000,00	125.571.059.000,00	121.589.374.680,00	96,82
4	2	01	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.043.969.454.000,00	1.023.051.251.000,00	968.906.920.572,00	94,70
4	2	01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	235.585.152.000,00	235.690.032.080,00	228.772.561.825,00	97,06
			JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	1.319.268.857.077,00	95,30

Kode Rekening	Uraian	Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.405.125.665.000,00	1.384.312.342.080,00	1.319.268.857.077,00	95,30
	JUMLAH PENDAPATAN	2.391.667.384.389,04	2.304.056.812.947,46	2.136.576.334.242,71	92,73

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 31 Desember 2025 (unaudited)

1. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 2.378.164.784.880,22 dengan realisasi sebesar Rp. 2.105.211.579.739,38 atau 88,52%. Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara garis besar dapat dilihat pada Tabel I.12. sebagai berikut:

Tabel I.12
Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	2.494.485.454.444,22	2.378.164.784.880,22	2.137.805.717.846,47	89,89
5 1	BELANJA OPERASI	2.002.390.855.967,73	1.829.975.263.519,52	1.650.721.687.541,36	90,20
5 1 01	Belanja Pegawai	1.093.421.238.416,00	1.025.061.392.339,38	958.196.877.214,55	93,47
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	844.842.893.657,73	754.989.345.180,14	643.964.396.407,31	83,05
5 1 04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 05	Belanja Hibah	62.722.647.894,00	48.662.490.000,00	47.643.521.377,00	97,90
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.404.076.000,00	1.262.036.000,00	916.892.542,00	72,65
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.002.390.855.967,73	1.829.972.263.519,52	1.650.721.687.541,36	90,20
5 2	BELANJA MODAL	166.928.513.966,08	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	84,12
5 2 01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.992.869.753,00	77.251.010.992,51	67.230.013.615,00	87,02
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.328.498.570,00	25.008.975.776,00	15.173.821.734,34	60,67
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.578.561.643,00	59.580.842.826,00	52.337.919.061,77	87,91
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.028.584.000,00	8.021.393.580,00	8.118.920.935,00	101,42
	JUMLAH BELANJA MODAL	166.928.513.966,08	169.862.223.174,51	142.900.675.346,11	80,37

Kode Rekening			Uraian	Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	37.052.375.684,41	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	37.052.375.684,41	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73
			JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	37.052.375.684,41	10.968.907.347,19	958.263.380,00	8,73
5	4		BELANJA TRANSFER	288.113.708.826,00	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	286.668.508.826,00	349.919.618.839,00	327.036.969.079,00	93,43
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	1.445.200.000,00	17.438.772.000,00	16.188.122.500,00	92,82
			JUMLAH BELANJA TRANSFER	288.113.708.826,00	367.358.390.839,00	343.225.091.579,00	93,43
			JUMLAH BELANJA	2.494.485.454.444,22	2.378.164.784.880,22	2.137.805.717.846,47	89,89
			SURPLUS/DEFISIT	-102.808.070.055,18	-74.107.971.932,76	-1.229.383.603,76	1,65

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 31 Desember 2025 (unaudited)

2. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 74.107.971.932,76 dengan realisasi sebesar Rp. 75.823.079.043,76 atau 102,31%. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel I.13 berikut:

Tabel I.13
Target dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening			Uraian	Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6			PEMBIAYAAN DAERAH	102.808.070.055,18	74.107.971.932,76	75.823.079.043,76	102,31
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00
			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	163.914.551.344,18	135.214.453.221,76	135.214.453.221,76	100,00

Kode Rekening			Uraian	Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.106.481.289,00	61.106.481.289,0	59.391.374.178,00	97,19
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.106.481.289,00	59.106.481.289,00	59.391.374.178,00	100,48
			JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.106.481.289,00	61.106.481.289,00	59.391.374.178,00	97,19
			PEMBIAYAAN NETTO	102.808.070.055,18	74.107.971.932,76	75.823.079.043,76	102,31
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	74.593.695.440,00	0,00

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tanggal 31 Desember 2025 (unaudited)

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

1. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
4. Rendahnya PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan
5. Rendahnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Rendahnya Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
7. Rendahnya Ekspor
8. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah
9. Rendahnya Pembangunan Manusia
10. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi
11. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan
12. Kurangnya ketersediaan infrastruktur
13. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang

14. Tingginya risiko bencana.
15. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan
16. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk
17. Lambatnya penurunan kemiskinan
18. Rendahnya kesempatan kerja
19. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun 2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 memberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepala daerah. Inmendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2025 ini merupakan Tahun ketiga dari Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 atau memasuki tahun terakhir dokumen perencanaan yang menggunakan dokumen RPD Tahun 2023-2026 setelah di terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu untuk **“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan 2025”**. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 sebagai bagian dari RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung,

konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Substansi dokumen RPD ini juga mengintegrasikan substansi Peraturan lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Standar Pelayanan Minimal, dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Kepulauan Bangka Belitung, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan ekonomi dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 beserta indikator dan target kinerja ditampilkan seperti pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)
Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*	3,85	4,23	4,43	4,60	4,60	4,60
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	4,03	4,05	4,25	4,45	4,45	4,45
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	0,46	0,46
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55	4,55
		Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55	5,55
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	2,50	2,50
		Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	6,53	6,53
		Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMD N) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	34,12	34,12
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58	72,58
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	80,42	80,42

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	
Provinsi.		Lembaga dalam demokrasi								
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51	
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	25,50	49,51	69,85	100	100	
		Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8	
		Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	160,98	160,48	159,98	159,48	158,98	158,98	
		Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	0,748	
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	1,68	
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	4,01	
	Indeks Gini	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	4,19	
		Meningkatkan Kualitas Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5	

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan, selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan.

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan

selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS), telah dirumuskan dan ditetapkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 7. Program Perizinan Usaha Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5. Program Kawasan Permukiman 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
3.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
4.	SEKRETARIAT DAERAH	1. Program Perekonomian Dan Pembangunan 2. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 3. Program Penataan Organisasi 4. Program Kesejahteraan Rakyat
5.	BADAN KEUANGAN DAERAH/KEUANGAN	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6.	DINAS KESEHATAN,	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI, RSJD dr.SAMSI JACOBALIS	Daerah Provinsi 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8.	INSPEKTORAT DAERAH	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
9.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial
10.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh) 7. Program Pengembangan Umkm 8. Program Perekonomian Dan Pembangunan
11.	DINAS PENDIDIKAN	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 6. Program Perlindungan Khusus Anak

13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
15.	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6. Program Pengelolaan Permuseuman 7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 8. Program Pemasaran Pariwisata 9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR	
		1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		
		2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
		1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		
		3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		Provinsi		
		3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
		1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		
		4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
		1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
		1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		
		6. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
		1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
		7. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
		1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		8. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
		1. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		
2	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN	9. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(SDA)		
		1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
		1. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
		12. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
		13. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		
		2. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		
4	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH	14. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
5	BADAN KEUANGAN DAERAH/KEUANGAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PENYEMPURNAAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA	
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
6	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI, RSJD dr.SAMSI JACOBALIS/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
		1. Peningkatan Pelayanan BLUD		
7	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH	3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		1. kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
9	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH	2. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
		1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		
		2. Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum		
		3. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
		1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
10	INSPEKTORAT DAERAH	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
		2, PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
		1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
11	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PEMBERANTASAN KEMISKINAN	
		1. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
		2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
12	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI, RSJD dr.SAMSI JACOBALIS/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
		2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
		1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		5. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
		Kegiatan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
		6. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		7. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
		1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		8. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		9. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
		10. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
		11. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
		2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
14	DINAS PENDIDIKAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	12. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
		2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
		3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus		
		13. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
		1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
		2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
		14. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		1. Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
16	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		
17	DINAS KESEHATAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
18	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH	4, PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		
19	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI, RSJD dr.SAMSI JACOBALIS/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provins	MENJAMIN TERSEDIAANYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI SELURUH RAKYAT	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
		4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
		2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
		2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
		3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
		1. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
		2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
		4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		1. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		2. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
20	DINAS PENDIDIKAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 4. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PENGUATAN PENDIDIKAN, SAINS, TEKNOLOGI, DAN DIGITALISASI	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PENGUATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA SERTA HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG KONDUSIF	
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA/ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENGUATAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, ANAK, DAN PENYANDANG DISABILITAS	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
		52. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
		1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
		2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
		4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
		5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
		2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
		6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		
		3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
23	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
		2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
		8. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
		1. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	MENJAMIN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	
		1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
		1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
		3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
		1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		
		4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
		1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
		1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
		6. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		
		7. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
		1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		
		8. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
		1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		
25	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
		1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
		1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
26	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	MENJAMIN KETERSEDIAAN PUPUK, BENIH, DAN PESTISIDA LANGSUNG KE PETANI	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		
		2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
		1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		
27	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	MENJAMIN PEMBANGUNAN HUNIAN BERKUALITAS TERJANGKAU DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT	
		1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
		2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
		1. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
		3. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
		1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
28	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	MELANJUTKAN PEMERATAAN EKONOMI DAN Penguatan UMKM MELALUI PROGRAM	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
			KREDIT USAHA DAN PEMBANGUNAN IKN SERTA KOTA INOVATIF-MANDIRI	
		1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
		1. Kegiatan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		
		3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
		1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
		1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
		7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
		8. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
		2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN/URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	, PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	MELANJUTKAN HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN MARITIM	
		1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
		2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
		1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
		3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
		1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	MEMASTIKAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA, KEBEBASAN BERIBADAH, DAN PERAWATAN RUMAH IBADAH	
		1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
31	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH	2. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		
		2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		
32	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA/	1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PELESTARIAN SENI BUDAYA, PENINGKATAN EKONOMI KREATIF, DAN PRESTASI OLAHRAGA	
		1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		
		2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
		1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
		2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
		3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
		1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
		3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
		1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
		1. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi		
		7. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
		1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
		2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
		8. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
		1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
		9. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
		1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
		2. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
		10 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
		1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
		2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Nama Program dan atau Kegiatan	Jenis 17 Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
TOTAL		95 Program		

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1.3.1. Latar Belakang

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah.

Terkait pelaksanaan penerapan pada Tahun 2025, untuk itu disusun laporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

1.3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar pelayanan Minimal Kesehatan.

1.3.3. Kesimpulan

Demikian laporan capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disampaikan. Dimana untuk indeks capaian penerapan SPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan adalah sebesar 94,78 %. Dengan rincian indeks capaian urusan pendidikan yaitu 99,50 % (kategori tuntas utama), urusan kesehatan dengan indeks capaian sebesar 99,51 % (kategori tuntas utama), urusan pekerjaan umum dengan indeks

capaian sebesar 85,71 (kategori tuntas madya), urusan perumahan rakyat dengan indeks capaian sebesar 100 % (kategori tuntas paripurna), urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan indeks capaian sebesar 96.67 % (kategori tuntas utama) dan urusan sosial dengan indeks capaian sebesar 87,30 % (kategori tuntas madya).

Berdasarkan hasil capaian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian SPM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah tercapai. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian seperti urusan pekerjaan umum, dimana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki SPAM regional dan SPALD regional karena terkendala beberapa hal. seperti kondisi geografis (sumber air baku) di Bangka Belitung. sehingga indikator ini belum dapat untuk dilaksanakan. Prioritas untuk SPAM saat ini adalah meningkatkan capaian SR dan perluasan jaringan SPAM Perpipaan.

Namun demikian pemerintah provinsi pada Tahun 2025 telah melakukan upaya bantuan kepada pemerintah kabupaten berupa Kegiatan pengembangan jaringan perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak Selanjutnya Kegiatan Penyediaan Prasarana Jamban Sehat untuk Pemicuan PHBS dari Intervensi Penurunan Stunting di 5 (lima) Kabupaten sebanyak 333 unit (Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur). Adapun kegiatan pembangunan ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan capaian SPM kabupaten bagi masyarakat dan sekaligus menjadi capaian SPM provinsi.

Untuk pelaksanaan SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan yang berfokus pada akurasi data, keterbatasan fasilitas rehabilitas, dan dinamika ekonomi lokal.

Pada urusan kesehatan dan trantibunlinmas masih sulitnya menghitung target capaian SPM dalam tahapan penghitungan kebutuhan. dikarenakan indikatornya bersifat respon kasus. Serta masih kekurangan tenaga kesehatan untuk dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum adalah adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran. maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran. sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024 (N-1)	Capaian Kinerja Tahun 2025 (N)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,55	75,26	0,95
2	Angka Kemiskinan	5,08	4,77	-6,10
3	Angka Pengangguran	4,63	4,45	-3,89
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,77	4,09	431,17
5	Pendapatan Per Kapita*	70.193.324	75.322.526	7,31
6	Ketimpangan Pendapatan	0,235	0,214	-8,94

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Berdasarkan tabel indikator makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, dapat dijelaskan mengenai performa kinerja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yaitu;

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Meningkat

Indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan lompatan yang sangat baik yaitu Pertumbuhan ekonomi meroket dari 0,77% pada 2024 menjadi 4,09% pada 2025.

Kenaikan sebesar 431,17% ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi yang sangat kuat. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh normalisasi aktivitas sektor pertambangan/komoditas atau keberhasilan program diversifikasi ekonomi daerah.

2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Per Kapita menunjukkan perbaikan taraf hidup masyarakat secara umum.

- IPM: Naik dari 74,55 menjadi 75,26 (+0,95%). Angka di atas 75 menunjukkan kategori pembangunan manusia yang "Tinggi".
- Pendapatan Per Kapita: Meningkat dari Rp70,19 juta menjadi Rp75,32 juta. Kenaikan sebesar 7,31% ini mencerminkan peningkatan daya beli dan produktivitas masyarakat Bangka Belitung.

3. Penurunan Masalah Sosial (Kemiskinan & Pengangguran)

Pemerintah daerah berhasil menekan dua indikator krusial dalam pembangunan sosial.

- Angka Kemiskinan: Berhasil ditekan sebesar 6,10%, turun dari 5,08% menjadi 4,77%.
- Angka Pengangguran: Mengalami penurunan sebesar 3,89%, dari 4,63% menjadi 4,45%.

Penurunan kedua angka ini berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi cukup inklusif (menciptakan lapangan kerja dan membantu kelompok rentan).

4. Perbaikan Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator Ketimpangan Pendapatan menunjukkan tren yang sangat sehat. Terjadinya penurunan ketimpangan sebesar 8,94%, dengan nilai Gini Ratio turun dari 0,235 ke 0,214. Angka 0,214 menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat rendah. Ini berarti distribusi kekayaan di Bangka Belitung jauh lebih merata dibandingkan banyak provinsi lain di Indonesia.

Tahun 2025 merupakan tahun prestasi bagi Kepulauan Bangka Belitung. Semua indikator bergerak ke arah yang positif:

1. Ekonomi tumbuh agresif setelah stagnasi di tahun sebelumnya.
2. Kesenjangan sosial mengecil secara signifikan (Gini Ratio turun tajam).
3. Kualitas manusia meningkat seiring dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Namun tantangan kedepan pemerintah daerah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 4,09% ini agar tidak kembali melandai seperti angka 0,77% di tahun 2024 dan memastikan angka ketimpangan tetap rendah.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	71,99		
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	69,28		
		Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	67,28		
		Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	64,73		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,69		
		Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	100		
3	Pekerjaan Umum	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	64,95		
		Tingkat kemantapan jalan	92,91		
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	2,88		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengendalian dan Mitigasi Banjir			
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		
		Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	28,74		
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	0		
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	106,32		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100		
		Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Praja			
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	55		
		Persentase penanganan pra bencana	14,29		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
		Persentase penanganan pasca bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	8,50		
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	63,16		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	77,27		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	27,99		
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100		
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100		
9	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	131,17		
10	Pertanahan	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	76,46		
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	84,22		
11	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	62,96		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100		
		Pemanfaatan data kependudukan	100		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	-79,49		
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	100		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	67,69		
		Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	107,50		
15	Perhubungan	Konektivitas Provinsi	0,66		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,19		
		Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	58,33		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	96,29		Belum ada dokumen pendukung
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95,45		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	4,72		Belum ada dokumen pendukung
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,14		
		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	100		
		Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil	0		Belum ada dokumen pendukung
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-59,85		
		Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	60,06		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100		
		Persentase partisipasi pemuda dalam	0,24		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	36,36		
		Persentase jumlah atlet berprestasi	20,51		
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	41,72		
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	42,70		
22	Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	69,23		
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	58,00		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	37,10		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100		
25	Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya	101,04		
		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi	-52,47		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	86,71		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	115,75		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	267,66		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ke provinsi			
		Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum	3,32		
27	Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	-24,47		
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	5,64		
		Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	2,15		
28	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	35,66		
		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	27,07		
		Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	-615,08		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	Tidak ada		
		Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	100		
30	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi	100		
		Nilai ekspor barang per provinsi	114,03		
31	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3.	99,44		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi			
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasiona	61,97		
		Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	5,97		
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	68,62		
32	Transmigrasi		0		Tidak ada IKK

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	100		
2	Kelembagaan, Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	81,22		
3	Fungsi Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,06		Nilai Tahun 2025 belum diliris
		Kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	3,00		
		Manajemen risiko Indeks	3,16		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	76,87		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00		
		Pemanfaatan sistem pengadaan	25,90		
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	22,67		
5	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tidak Tepat		
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	53,85		
6	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	82		
7	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100		

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, terdapat 19 sasaran Pemerintah Daerah dengan 19 indikator Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga target pencapaian pembangunan

menjadi jelas dan terukur. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU daerah menjadi dasar acuan utama dalam penetapan target dan indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, memastikan bahwa komitmen kinerja kepala daerah selaras dengan tujuan strategis daerah.

Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun dan memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPD Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Adapun capaian indikator kinerja pada tahun 2025 seperti yang disajikan pada Tabel III.6 sebagai berikut:

Tabel III.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	2,31	4,43	2,32	52,37%	Naik 0,01
2.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	4,91	4,25	4,95	116,47%	Naik 0,04
3.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-4	1,75	6,67	381,14%	Naik 10,67
4.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-3,93	4,5	4,33	96,22%	Naik 8,26
5.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-0,34	5,5	4,97	90,36%	Naik 5,31
6.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	-0,05	2,56	25,72	1004,69%	Naik 25,77
7.	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	-16,5	6,99	14,57	208,44%	Naik 31,07
8.	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	68	30,77	-40,15	-130,48%	Turun 108,15
9.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,55	72,35	75,26	94,77%	Naik 0,71
10.	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	75,95	79,41	81,91	103,15%	Naik 5,96
11.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	84,37	69,75	84,37 *)	120,96%	Tetap

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	62,69	69,85	64,34	92,11%	Naik 1,65
13.	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,65	0,75	0,7	93,33%	Naik 0,05
14.	Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	143,42	159,48	113,13	129,06%	Naik 30,29
15.	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,8	0,739	0,8	108,10%	Tetap
16.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,35	1,7	1,36	101,38%	Turun 0,01
17.	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,55	4,4	4,77	91,59%	Turun 22%
18.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,63	4,36	4,3	101,38%	Naik 0,33
19.	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,8	76,7	77,34	100,83%	Naik 4,54

Sumber: Perangkat Daerah Penanggung Jawab Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026
(Data diolah)

Berdasarkan tabel realisasi capaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 menunjukkan dari 19 indikator kinerja, terdapat 8 indikator kinerja yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026. Namun, masih terdapat 9 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target. Sebanyak 2 indikator belum bisa ditentukan keberhasilannya karena capaian tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian pengampu indikator. Meskipun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2024. Masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

Dari total 9 indikator yang telah tercapai, atau ketercapaiannya sama atau bahkan lebih dari 100% yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian,
- 2) Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
- 3) Pertumbuhan Investasi
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 5) Indeks Resiko Bencana
- 6) Indeks Desa Membangun
- 7) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari total 10 indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras

<100% yaitu:

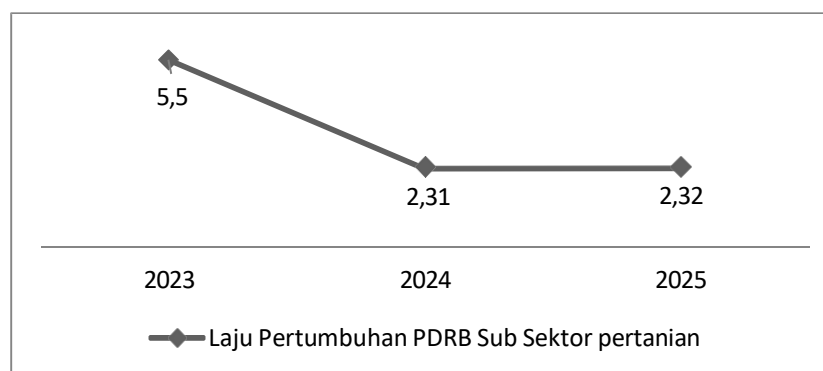
- 1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
 - 2) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - 3) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - 4) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
 - 5) Laju Pertumbuhan Ekspor
 - 6) Persentase Ketersediaan Infrastruktur
 - 7) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 8) Persentase Angka Kemiskinan
 - 9) Indeks Kualitas Lingkungan
- Sebanyak 2 indikator yang belum bisa ditentukan keberhasilannya dikarenakan nilai capaiannya belum dirilis oleh Kementerian pengampu, yaitu:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi
- 2) Indeks Demokrasi Provinsi

Dampak dari pandemi masih berpengaruh terhadap capaian kinerja. Sebelas indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersebut diatas, diinformasikan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian.

Grafik III.4
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian. Dari hasil pengukuran indikator meskipun secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, namun capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,01.

Sebagai penghidupan sebagian besar masyarakat, pengembangan sektor pertanian harus mampu menyejahterakan petani dan buruh tani. Peningkatan kesejahteraan petani secara langsung akan mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

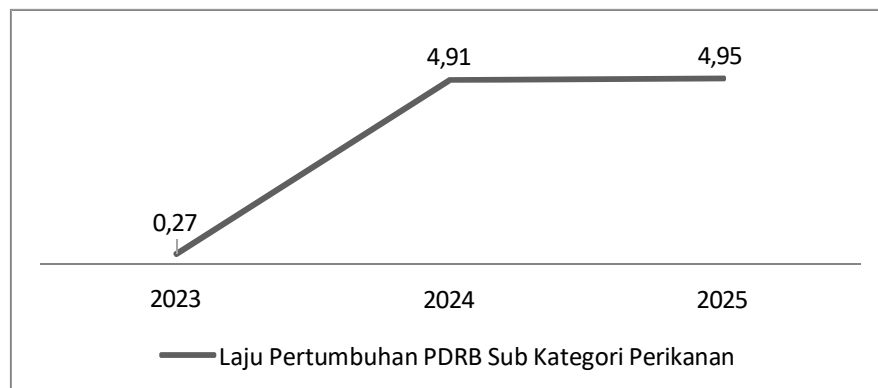
Sampai saat ini, peningkatan kinerja sektor pertanian tampaknya masih menghadapi banyak hambatan. Ini berdampak pada kesejahteraan petani yang belum menikmati hasil usaha pertanian secara optimal.

Sebagai salah satu indikator yang mencerminkan produktivitas dan kemampuan sektor pertanian dalam memberikan pendapatan bagi petani dan buruh tani, nilai tambah per tenaga kerja menunjukkan adanya peningkatan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2014, nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 57,10 juta rupiah. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi 114,17 juta rupiah atau hampir dua kali lipat dibandingkan kondisi awal periode.

Secara umum, peningkatan ini terjadi secara bertahap sepanjang 2014–2024, meskipun laju pertumbuhannya tidak selalu stabil pada setiap tahun. Namun demikian, peningkatan nilai tambah per tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kesejahteraan petani dan buruh tani secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari indikator lain seperti nilai tukar petani, tingkat upah buruh tani dan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian, yang masih menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian.

2. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

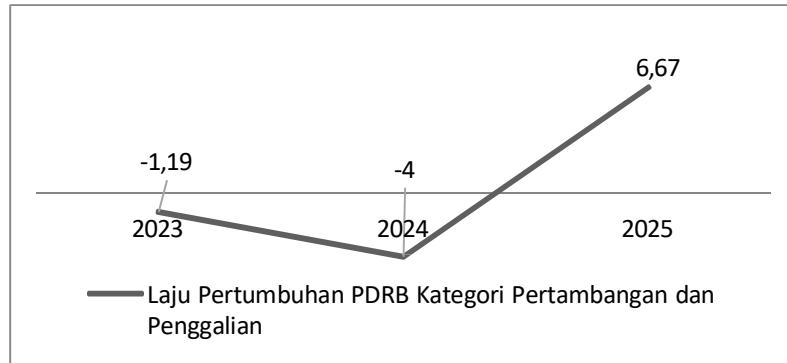
Grafik III.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
Tahun 2023 – 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,04.

3. Laju Pertumbuhan PDRB Sub sketor Pertambangan dan Penggalian

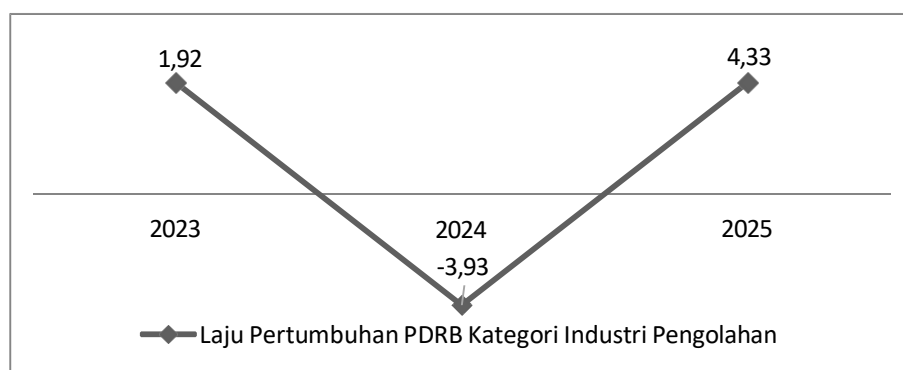
Grafik III.6
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, sehingga capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 10,67.

4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Grafik III.7
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2023 - 2025

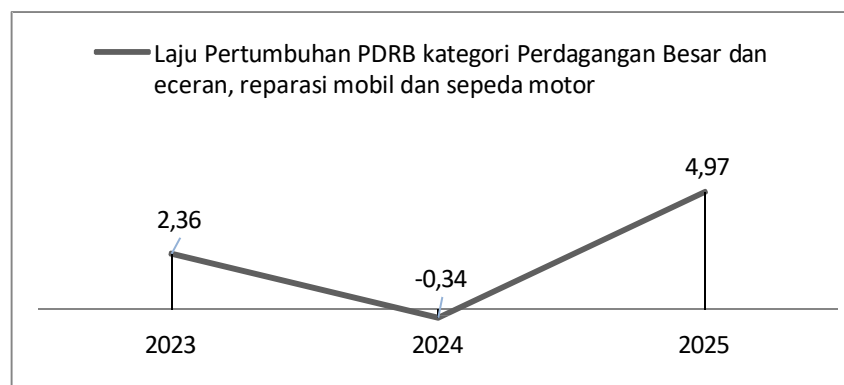


Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, sehingga capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 8,26.

Meskipun sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, namun beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi secara y-on-y, diantaranya lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi yang merupakan penyumbang terbesar pertama dan keempat terhadap perekonomian. Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar Gambar 3 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2025 (y-on-y) (persen) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2025 BRS No. 12/02/19/Th. XXIV, 5 Februari 2026 5 0,44 persen secara y-on-y sebagai dampak dari permasalahan tata kelola timah yang belum kunjung usai. Selain itu, lapangan usaha Konstruksi juga mengalami kontraksi sebesar 0,01 persen secara y-on-y. Adanya defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, menuntut pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja termasuk efisiensi pada belanja proyek fisik. Hal ini ikut berdampak pada penurunan kinerja lapangan usaha Konstruksi secara y-on-y.

5. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan

Grafik III.8
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan PDRB sub Sektor Perdagangan diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Perdagangan. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, sehingga capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 5,31.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen (q-to-q). Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 10,57 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,19 persen serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 8,12 persen. Dengan semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendorong peningkatan yang tinggi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan tinggi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

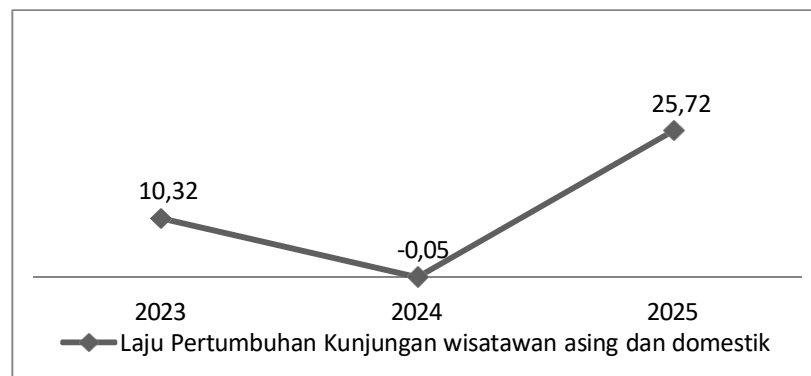
juga tidak terlepas dari tingginya kebutuhan bahan baku untuk mendukung Program MBG yang belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal.

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan baku harus didatangkan dari luar daerah, sehingga mendorong peningkatan aktivitas perdagangan antarwilayah. Sementara pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pertambangan sebagai matapencaharian mereka. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2025 (q-to-q), lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 1,49 persen, diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 persen serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,85 persen

Meskipun secara angka target Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, namun capaian kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

6. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik

Grafik III.9
Perkembangan Laju Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, sehingga capaian kinerja Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 25,77.

Capaian ini di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan Wisatawan Nusantara

Perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tujuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Januari–Desember 2025 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah perjalanan wisnus pada periode Januari–Desember 2025 tercatat sebesar 4,51 juta perjalanan. Angka ini meningkat 43,45 persen

dibandingkan Januari–Desember 2024 (3,14 juta perjalanan).

Sedangkan perjalanan wisatawan nusantara asal Kepulauan Bangka Belitung Januari–Desember 2025 mencapai 4,85 juta perjalanan, angka ini naik 45,89 persen dibandingkan Januari–Desember 2024 (3,32 juta perjalanan). Perjalanan wisatawan nusantara berdasarkan tujuan pada Desember 2025 tercatat sebesar 394,21 ribu perjalanan. Jumlah ini naik 5,60 persen bila dibandingkan November 2025 (m-to-m), jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y) turun 3,09 persen. Wisatawan nusantara pada Desember 2025 didominasi tujuan utama perjalanan ke Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah dengan proporsi sekitar 67,65 persen dari total perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Jumlah Tamu Menginap

Jumlah tamu yang menginap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Desember 2025 sebanyak 65.214 orang. Jumlah ini naik 9,53 persen dibandingkan jumlah tamu yang menginap November 2025 yang mencapai 59.539 orang. Untuk jumlah tamu hotel bintang tercatat 48.607 orang, naik sebesar 11,81 persen dibandingkan dengan jumlah tamu bulan sebelumnya. Berdasarkan kabupaten/kota apabila dibandingkan kondisi bulan sebelumnya, Kabupaten Belitung mengalami kenaikan jumlah tamu hotel bintang sebesar 20,30 persen atau jumlah tamu sebanyak 17.760 orang, Kabupaten Bangka sebesar 12,52 persen atau jumlah tamu sebanyak 5.087 orang, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7,14 persen atau jumlah tamu sebanyak 6.540 orang dan Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan sebesar 6,76 persen atau jumlah tamu sebanyak 18.933 orang.

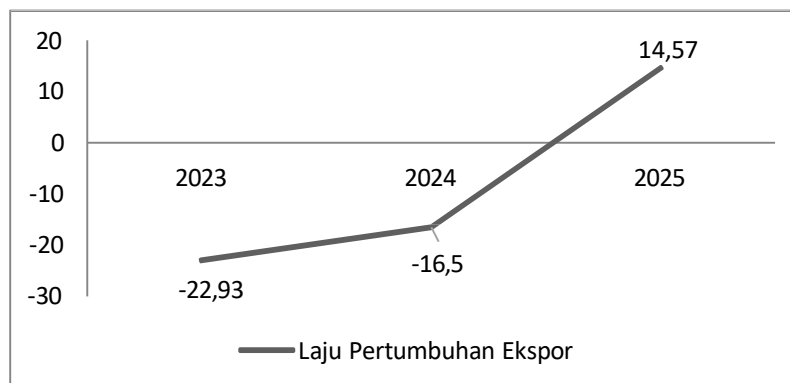
Sementara itu, jumlah tamu yang menginap di hotel nonbintang pada Desember 2025 tercatat 16.607 orang, naik sebesar 3,35 persen dibandingkan dengan jumlah tamu bulan sebelumnya. Berdasarkan kabupaten/kota apabila dibandingkan kondisi bulan sebelumnya sangat bervariasi. Kenaikan terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 24,73 persen atau jumlah tamu sebanyak 706 orang, Kabupaten Bangka naik sebesar 20,19 persen atau jumlah tamu sebanyak 3.756 orang, Kabupaten Belitung naik 7,76 persen atau jumlah tamu sebanyak 3.082 orang dan Kabupaten Bangka Barat naik sebesar 4,26 persen atau jumlah tamu 1.934 orang. Sementara penurunan terjadi di Kota Pangkalpinang yang turun 8,46 persen atau jumlah tamu 5.322 orang, Kabupaten Belitung Timur turun 2,97 persen atau jumlah tamu 1.045 orang dan Kabupaten Bangka Selatan turun 1,17 persen atau jumlah tamu 762 orang.

3. Rata-Rata Lama Menginap Tamu

Rata-rata Lama Menginap tamu (RLMT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Desember 2025 mencapai 1,46 malam atau turun 0,01 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. RLMT terlama ada di Kabupaten Belitung yaitu selama 1,71 malam, sedangkan tersingkat ada di Kabupaten Bangka yang tercatat 1,01 malam. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kenaikan RLMT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Desember 2025 ada di Kota Pangkalpinang sebesar 0,10 poin dan Kabupaten Bangka naik sebesar 0,01 poin. Sementara penurunan RLMT terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,54 poin, Kabupaten Bangka Selatan turun 0,15 poin, Kabupaten Bangka Tengah turun 0,11 poin, Kabupaten Belitung turun 0,07 poin dan Kabupaten Belitung Timur turun 0,06 poin.

7. Laju Pertumbuhan Ekspor.

Grafik III.10
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekspor
Tahun 2023 – 2025



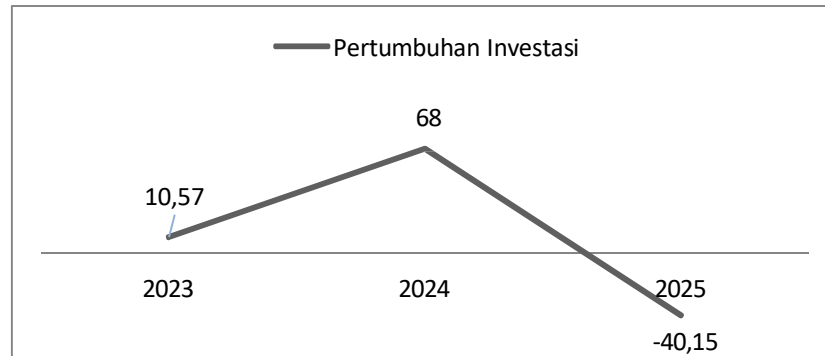
Kinerja sasaran Meningkatnya Ekspor diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekspor. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Laju Pertumbuhan ekspor telah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, sehingga capaian kinerja Laju Pertumbuhan ekspor menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 31,07.

Pada Desember 2025, total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar US\$207,83 juta. Secara y-on-y (Desember 2025 dibanding Desember 2024) naik sebesar 42,65 persen, sementara jika dibandingkan secara kumulatif Januari-Desember 2025 dibandingkan periode bulan yang sama pada tahun lalu (c to c), mengalami kenaikan sebesar 19,73 persen. Untuk komoditas timah, pada bulan Desember 2025, nilai ekspornya sebesar US\$180,84 juta, dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu (y-on-y) sebesar US\$124,64 tumbuh sebesar 45,09 persen. Nilai ekspor timah kumulatif Januari-Desember 2025 sebesar US\$1.664,27 juta, dibandingkan dengan periode bulan yang sama pada tahun lalu sebesar US\$1.319,96 juta (c to c), tumbuh sebesar 26,08 persen. Sementara itu, untuk ekspor komoditas nontimah bulan Desember tercatat sebesar US\$26,99 juta atau naik sebesar 28,20 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

Nilai ekspor nontimah secara kumulatif Januari-Desember 2025 sebesar US\$372,48 juta, dibandingkan dengan periode bulan yang sama pada tahun lalu (c to c), nilai ekspor nontimah juga mengalami penurunan sebesar 2,29 persen.

8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah.

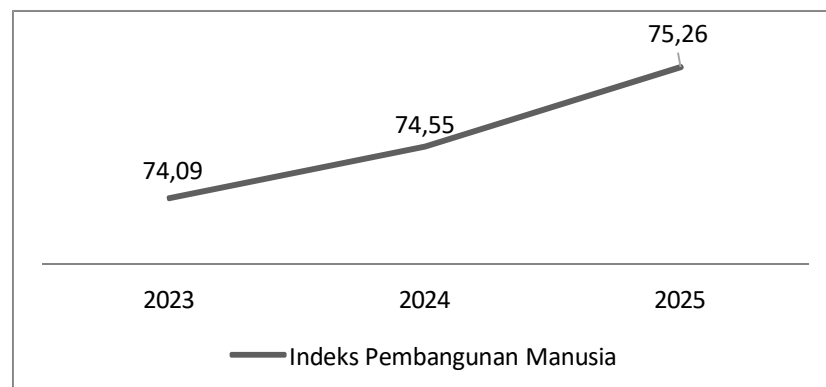
Grafik III.11
Perkembangan Laju Pertumbuhan Investasi
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah diukur dengan indikator Pertumbuhan Investasi. Dari hasil pengukuran indikator, secara angka target Pertumbuhan Investasi Tahun 2025 belum mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Capaian kinerja Pertumbuhan Investasi menunjukkan arah penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan sebesar 108,15.

9. Meningkatnya Pembangunan Manusia.

Grafik III.12
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan Pembangunan Manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari hasil pengukuran indikator secara angka target IPM tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 0,71. Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan, terutama indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan).

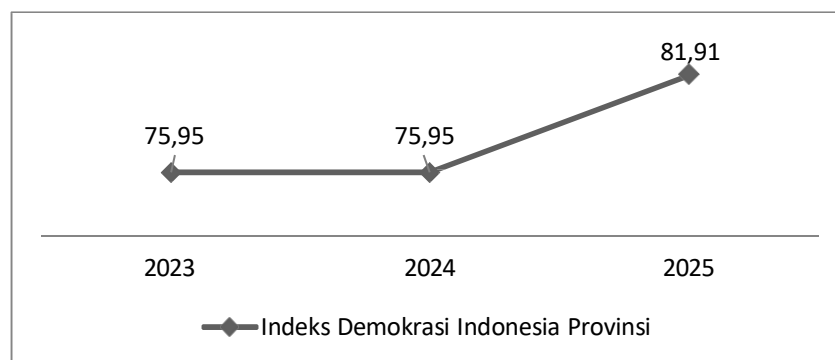
Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,46 tahun, meningkat 0,34 tahun atau lebih lama 4 bulan 2 hari dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada tahun 2025 meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,49 tahun menjadi 12,50 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,32 tahun, dari 8,33 tahun menjadi 8,65 tahun pada tahun 2025.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2025 meningkat 170 ribu rupiah atau 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Dalam Demokrasi.

Grafik III.13
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Tahun 2023 - 2025

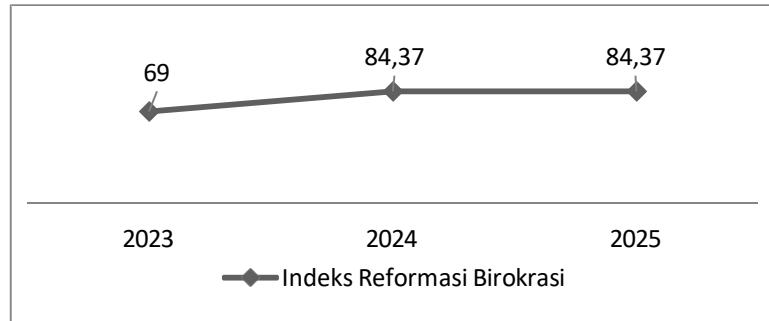


Kinerja sasaran Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi diukur dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi. IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 mencapai angka 81,91 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2023 yang sebesar 75,95. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan dari kategori “sedang” menjadi kategori “baik”. Nilai IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat karena adanya peningkatan pada aspek kebebasan dan aspek kesetaraan.

Peningkatan Aspek Kebebasan tidak lepas dari terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan pemenuhan hak-hak pekerja. Peningkatan Aspek Kesenjangan disebabkan oleh meningkatnya dari indikator kesetaraan gender, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah dan kesetaraan dalam pelayanan dasar. Penurunan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi disebabkan oleh menurunnya kinerja lembaga legislatif, netralitas penyelenggara pemilu dan pendidikan politik pada kader partai politik.

11. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

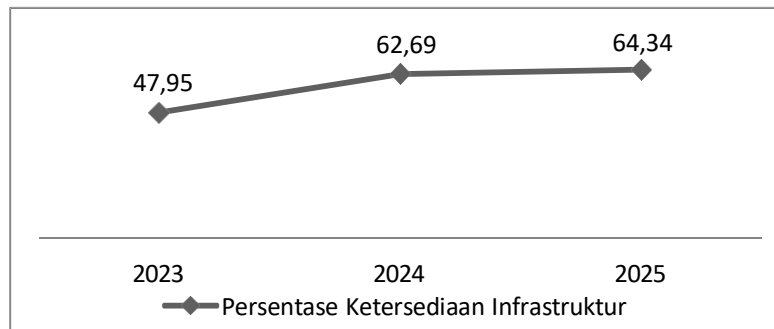
Grafik III.14
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dari hasil pengukuran secara angka meskipun hasil indikator Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia akan tetapi target sebesar 69,75 yang merupakan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sudah tercapai dengan realisasi 84,37 yang merupakan realisasi capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 .

12. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur.

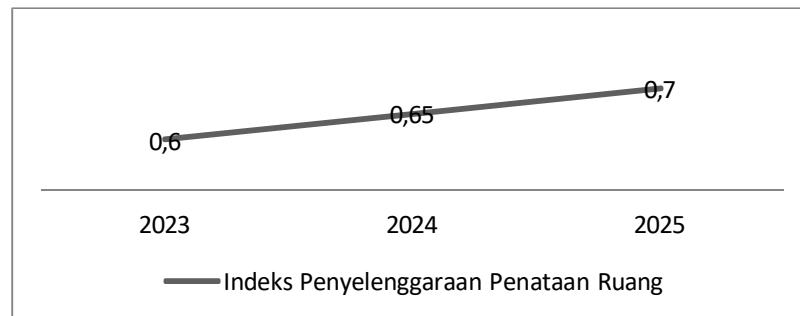
Grafik III.15
Perkembangan Persentase Ketersediaan Infrastruktur
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Infrastruktur. Dari hasil pengukuran secara angka target Persentase Ketersediaan Infrastruktur belum mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, namun secara realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,65 dari realisasi tahun sebelumnya.

13. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang.

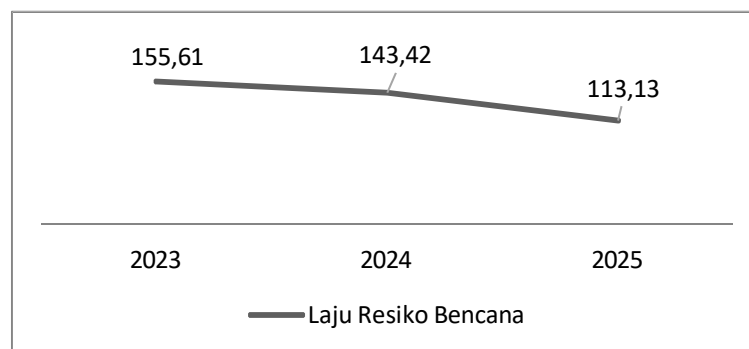
Grafik III.16
Perkembangan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang belum mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, Namun secara realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,05 dari realisasi tahun sebelumnya.

14. Menurunkan Resiko Bencana.

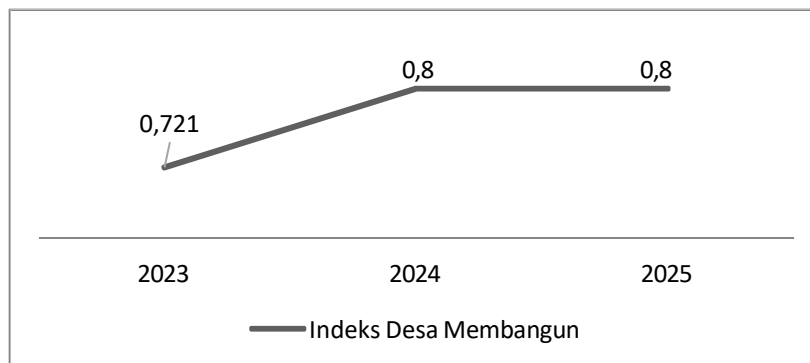
Grafik III.17
Perkembangan Indeks Resiko Bencana
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Menurunkan Resiko Bencana diukur dengan indikator Indeks Resiko Bencana. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Indeks Resiko Bencana sudah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dan secara realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 30,29 dari realisasi tahun sebelumnya.

15. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

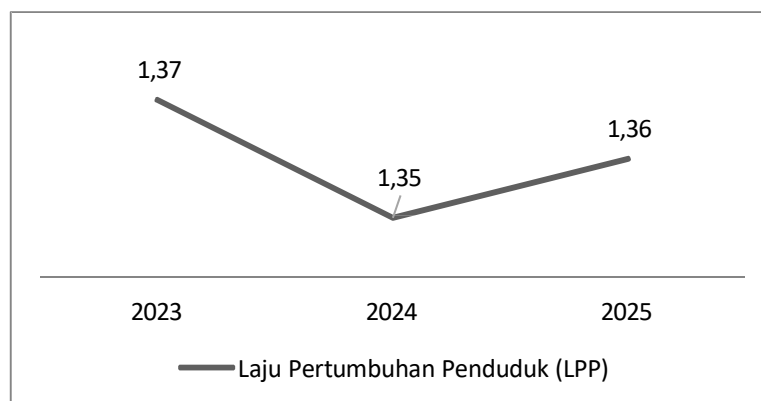
Grafik III.18
Perkembangan Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Indeks Desa Membangun belum mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 mengalami stagnan atau realisasinya sama dengan realisasi tahun 2024.

16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.

Grafik III.19
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Dari hasil pengukuran indikator meskipun secara angka target Laju Pertumbuhan Penduduk belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, tetapi capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan arah penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,01.

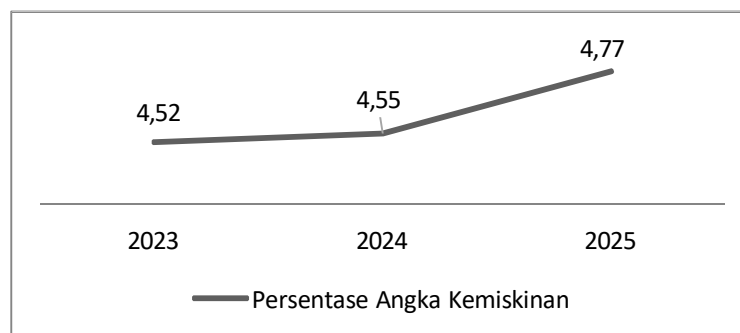
Dari sisi jumlah, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong kecil yakni hanya sekitar 2,49 persen dari jumlah penduduk Pulau Sumatera dan hanya sekitar 0,55 persen dari penduduk Indonesia. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 Hasil <https://babel.bps.go.id> Kependudukan 3 SP2020 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pada tahun 2021 sebanyak 1.471.787 jiwa.

Kemudian jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya hingga menjadi sebanyak 1.550.821 jiwa pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2021, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 79.034 jiwa. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, bahwa laju pertumbuhan penduduk geometrik mengalami penurunan yang signifikan, dari 1,48 persen pada tahun 2021 menjadi 1,34 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut mencerminkan fase transisi demografis yang sedang di alami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan keluarga berencana, peningkatan akses pendidikan dan perubahan kondisi ekonomi.

17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan.

Grafik III.20
Perkembangan Persentase Angka Kemiskinan
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Menurunkan Tingkat Kemiskinan diukur dengan indikator Persentase Angka Kemiskinan. Dari hasil pengukuran indikator meskipun secara angka target Persentase Angka Kemiskinan belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dan capaian kinerja Persentase Angka Kemiskinan menunjukkan arah penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22%.

Garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2025. Pada tahun 2011, Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 350.054,-, meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi Rp. 956.833,- pada tahun 2025. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

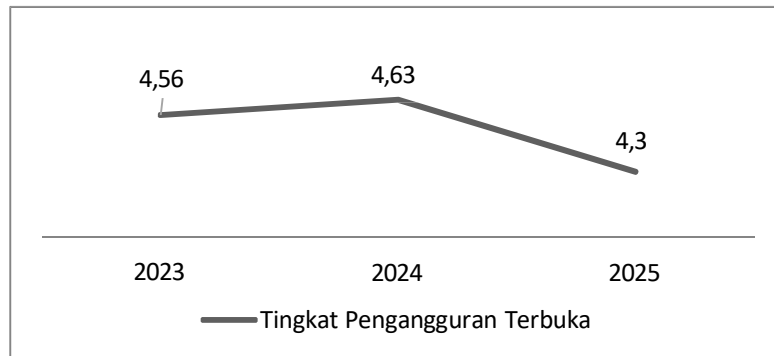
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gaps Index (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan.

Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung naik mendekati garis kemiskinan. Kelemahan indeks ini adalah tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga

dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2).

18. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Grafik III.21
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2023 - 2025



Kinerja sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Dari hasil pengukuran indikator secara angka target Tingkat Pengangguran Terbuka sudah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, dan secara realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,33 dari realisasi tahun sebelumnya.

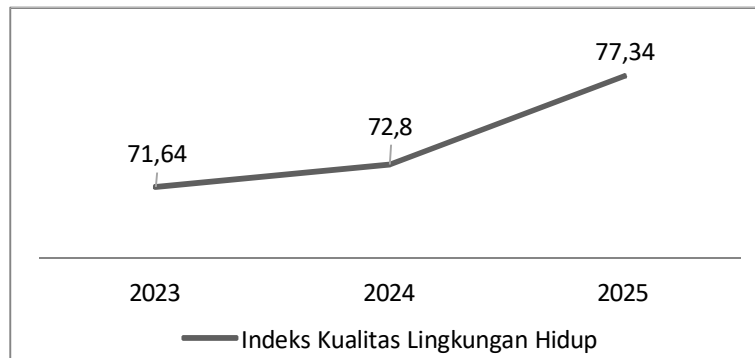
Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas November 2025 sebesar 4,30 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4–5 orang penganggur. Selama periode Februari 2024 November 2025, terjadi kenaikan dan penurunan TPT dengan kecenderungan kenaikan TPT pada periode Agustus dan penurunan TPT pada periode Februari dan November. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 826,38 ribu orang, naik 4,07 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,09 persen poin dibanding Agustus 2025. Penduduk yang bekerja pada November 2025 sebanyak 790,87 ribu orang, naik sebanyak 5,15 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,33 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Pada November 2025 sebanyak 387,21 ribu orang (48,96 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,25 persen poin dibanding Agustus 2025. Persentase setengah pengangguran pada November 2025 turun sebesar 2,03 persen poin, sementara pekerja paruh waktu pada November 2025 naik sebesar 1,05 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,30 persen, turun sebesar 0,15 persen poin dibanding pada Agustus 2025

Meskipun secara angka target ingkat Pengangguran Terbuka belum sesuai dengan target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, namun capaian kinerja ingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan arah perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Grafik III.22
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 - 2025



Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan serta menentukan arah perbaikan yang diperlukan. Dari hasil pengukuran indikator target Indeks Kualitas Lingkungan sudah mencapai target tahunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dan realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,54 dari realisasi tahun sebelumnya.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
 - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
 - h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023;
 - j) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - k) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen;
- b. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 51.64 Km;
- c. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 32.80 Km;
- d. Terlaksananya Preservasi Jembatan 466.00 m;
- e. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- f. Meningkatnya Persentase Operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi 80.00 Km;
- g. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- h. Terpenuhinya Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan 8232.00 Kelompok Masyarakat;
- i. Tersedianya Prasarana Pengembangan Kawasan 0.01 hektar;
- j. Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) 1.00 Unit;
- k. Terpenuhinya Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi 52900.00 Orang;
- l. Tersedianya Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1.00 Laporan;
- m. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;
- n. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan 1.00 Kegiatan;
- o. Tersedianya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;

- p. Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- q. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;
- r. Terlaksananya Layanan BMN 4.00 Layanan;
- s. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan;
- t. Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen;
- u. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 12.00 Dokumen;
- v. Terpenuhinya Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan (Kelompok Masyarakat) [PN-02] 10205.00 Kelompok Masyarakat;
- w. Tersedianya Optimasi Lahan 18.27 km²;
- x. Tersedianya SID Optimasi Lahan 1.00 Dokumen;
- y. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen;
- z. Tersedianya Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 40.00 laporan;
- aa. Tersedianya Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.00 Unit
- bb. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan;
- cc. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;
- dd. Tersedianya Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 6.00 Unit;
- ee. Terpenuhinya Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.20 km;
- ff. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan;
- gg. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan;

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.672.049.000,00,- dengan realisasi Rp. 21.743.898.803,00,- atau 57,72%.

3.1.1. Target Kinerja

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen. 2. Konservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 51.64 Km. 3. Konservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 32.80 Km. 4. Konservasi Jembatan 466.00 m.	3.817.181.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	67.378.000,00
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi 80.00 Km.	3.490.277.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	65.760.000,00

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan 8232.00 Kelompok Masyarakat. 2. Prasarana Pengembangan Kawasan 0.01 hektar. 3. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) 1.00 Unit. 4. Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan	8.692.288.000,00

		Diverifikasi 52900.00 Orang. 5. Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1.00 Laporan.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	1.100.000.000,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan 1.00 Kegiatan.	15.000.000,00
4	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan. 2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. 3. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	151.925.000,00
5	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan BMN 4.00 Layanan. 2. Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan. 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. 4. Layanan Manajemen Keuangan 12.00 Dokumen.	117.178.000,00
6	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan (Kelompok Masyarakat) [PN-02] 10205.00 Kelompok Masyarakat. 2. Optimasi Lahan 18.27 km2. 3. SID Optimasi Lahan 1.00 Dokumen.	12.395.270.000,00

7	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	28.040.000,00
---	----------------------------	---	---------------

3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. 999.999. 2. Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap. 3. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 40.00 laporan.	6.700.000,00
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah.	98.000.000,00
3	Program Dukungan Manajemen	2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.	39.789.000,00

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan. 2. IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi/Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan.	464.806.000,00

		3. Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran. 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.	114.138.000,00
3	Program Perdagangan Dalam Negeri	1. Business Matching pada Pameran Pangan Nusa. 2. Dukungan Administrasi Satker. 3. Perlindungan Konsumen di Daerah.	275.351.000,00

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Program Transmigrasi	1. Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.00 Unit.	446.008.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. 2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	61.560.000,00

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Transmigrasi	1. Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 6.00 Unit.	6.145.020.000,00

		2. Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.20 km.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. 2. Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	80.380.000,00

3.1.2. Realisasi

1) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	1. Meningkatnya Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen. 2. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 51.64 Km. 3. Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) 32.80 Km. 4. Terlaksananya Preservasi Jembatan 466.00 m.	3.549.577.497,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	65.393.108,16
3	Program Ketahanan Sumber Daya Air	1. Meningkatnya Persentase Operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi 80.00 Km.	2.935.992.698,00

4	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	65.760.000,00
---	----------------------------	--	---------------

2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N o	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Terpenuhiya Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan 8232.00 Kelompok Masyarakat. 2. Tersedianya Prasarana Pengembangan Kawasan 0.01 hektar. 3. Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW) 1.00 Unit. 4. Terpenuhiya Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi 52900.00 Orang. 5. Tersedianya Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1.00 Laporan.	8.392.066.318,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	949.632.247,00
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Terlaksananya Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Sereal	15.000.000,00

		Tanaman Pangan 1.00 Kegiatan.	
4	Program Dukungan Manajemen	1. Tersedianya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan. 2. Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. 3. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	114.915.000,00
5	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan BMN 4.00 Layanan. 2. Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan. 3. Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 Dokumen. 4. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 12.00 Dokumen.	65.122.000,00
6	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Terpenuhinya Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan (Kelompok Masyarakat) [PN-02] 10205.00 Kelompok Masyarakat. 2. Tersedianya Optimasi Lahan 18.27 km2. 3. Tersedianya SID Optimasi Lahan 1.00 Dokumen.	412.410.000,00
7	Program Dukungan Manajemen	1. Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Dokumen.	25.190.000,00

3) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. 999.999. 2. Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap. 3. Tersedianya Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi 40.00 laporan.	6.631.200,00
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah.	(Anggaran di Blokir)
3	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.	(Anggaran di Blokir)

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan. 2. IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Penerapan Sertifikasi/Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan. 3. Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit	(Anggaran di Blokir)

		Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan.	
2	Program Dukungan Manajemen	1. Layanan Perkantoran. 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran.	(Anggaran di Blokir)
3	Program Perdagangan Dalam Negeri	1. Business Matching pada Pameran Pangan Nusa. 2. Dukungan Administrasi Satker. 3. Perlindungan Konsumen di Daerah.	(Anggaran di Blokir)

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Program Transmigrasi	1. Tersedianya Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.00 Unit.	440.116.650,00
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. 2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	60.560.000,00

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program / Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Program Transmigrasi	1. Tersedianya Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 6.00 Unit. 2. Terpenuhinya Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi 2.20 km.	4.565.152.084,84
2	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan. 2. Terlaksananya Layanan Perkantoran 1.00 Layanan.	80.380.000,00

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian Pekerjaan Umum	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Infrastruktur Konektivitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.817.181.000,00	3.549.577.497,00	92,99	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.817.181.000,00	3.549.577.497,00	92,99	Peningkatan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Dukungan Teknis								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	257.777.000,00	257.777.000,00	100,00	1,00 Dokumen	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.826.535.000,00	1.574.640.389,00	86,21	51.64 Km	100	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.529.664.000,00	1.513.955.108,00	98,97	32.80 Km	100	APBN TA. 2025
			3. Output : OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)								
			1. Rincian Kegiatan : Preservasi Jembatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	203.205.000,00	203.205.000,00	100,00	466.00 m	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Kementerian Pekerjaan Umum	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.378.000,00	65.393.108,16	97,05	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.378.000,00	65.393.108,16	97,05	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.378.000,00	65.393.108,16	97,05	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Kementerian Pekerjaan Umum	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketahanan Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.490.277.000,00	2.935.992.698,00	84,12	Terwujudnya Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana pada Prgram Ketahanan Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.490.277.000,00	2.935.992.698,00	84,12	Meningkatnya Persentase Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air								
			1. Rincian Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.490.277.000,00	2.935.992.698,00	84,12	80.00 Km	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kementerian Pekerjaan Umum	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.760.000,00	65.760.000,00	100,00	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.760.000,00	65.760.000,00	100,00	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	65.760.000,00	65.760.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.692.288.000,00	8.392.066.318,00	96,55	Terwujudnya Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian serta Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	74,41	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Perlindungan dan Penyediaan Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.797.128.000,00	7.504.214.800,00	96,24	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	71,47	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Bantuan Kelompok Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.573.630.000,00	7.280.716.800,00	96,13	8232.00 Kelompok Masyarakat	100	APBN TA. 2025
			2. Output : Prasarana Pengembangan Kawasan								

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana Pengembangan Kawasan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	223.498.000,00	223.498.000,00	100,00	0.01 hektar	100	APBN TA. 2025
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	89.994.400,00	99,99	Meningkatnya kemanfaatan alsintan	100	APBN TA. 2025
			1. Output : Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
			1. Rincian Kegiatan : Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	89.994.400,00	99,99	1.00 Unit	100	APBN TA. 2025
			3. Kegiatan : Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	805.160.000,00	797.857.118,00	99,09	Meningkatnya kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida	100	APBN TA. 2025
			1. Output : Pelayanan Publik kepada masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	470.660.000,00	463.357.118,00	98,45	52900.00 Orang	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	334.500.000,00	334.500.000,00	100,00	1.00 Laporan	100	APBN TA. 2025
6	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.100.000.000,00	949.632.247,00	86,33	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.100.000.000,00	949.632.247,00	86,33	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.100.000.000,00	949.632.247,00	86,33	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
7	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Terwujudnya Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pangan Berkualitas								
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Koordinasi								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Serealiala Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.00 kegiatan	100	APBN TA. 2025
8	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	151.925.000,00	114.915.000,00	75,64	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	151.925.000,00	114.915.000,00	75,64	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.935.000,00	64.145.000,00	63,55	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.040.000,00	45.820.000,00	99,52	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
9	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.178.000,00	65.122.000,00	55,58	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pernakan	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pernakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117.178.000,00	65.122.000,00	55,58	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pernakan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan BMN	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.502.000,00	2.122.000,00	24,96	4.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Data dan Informasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.060.000,00	11.000.000,00	43,89	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.664.000,00	15.000.000,00	76,28	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	63.952.000,00	37.000.000,00	57,86	12.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
10	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.395.270.000,00	412.410.000,00	3,33	Terwujudnya Pelindungan dan Penyediaan Lahan	100	APBN TA. 2024

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pelindungan dan Penyediaan Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.395.270.000,00	412.410.000,00	3,33	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	100	APBN TA. 2024
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Bantuan Kelompok Masyarakat								
			1. Rincian Kegiatan : Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan (Kelompok Masyarakat) [PN- 02]	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.723.125.000,00	10.000.000,00	0,58	10205.00 Kelompok Masyarakat	100	APBN TA. 2025
			2. Output : Prasarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.282.145.000,00	12.410.000,00	0,12	18.27 km2	100	APBN TA. 2025
			3. Output : Dukungan Teknis								
			1. Rincian Kegiatan : SID Optimasi Lahan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.040.000,00	25.190.000,00	89,84	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.040.000,00	25.190.000,00	89,84	Terlaksananya serta Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Manajemen Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.040.000,00	25.190.000,00	89,84	1.00 Dokumen	100	APBN TA. 2025
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.700.000,00	6.631.200,00	98,97	Terwujudnya Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan melalui Pengelolaan Sumber Daya Ikan	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0,00	Belum Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	0	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Output Cadangan								
			1. Rincian Kegiatan : 999.999	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.700.000,00	6.631.200,00	98,97	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	100	APBN TA. 2025
			1. Output : Pemantauan produk								
			1. Rincian Kegiatan : Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.700.000,00	6.631.200,00	98,97	40.00 laporan	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.000.000,00	-	0,00	Belum Terwujudnya Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.000.000,00	-	0,00	Belum Meningkatnya Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Promosi								
			1. Rincian Kegiatan : Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.000.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.789.000,00	-	0,00	Belum Terpenuhinya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	0	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.789.000,00	-	0,00	Belum Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	0	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39.789.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
15	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	464.806.000,00	-	0,00	Belum Terwujudnya Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dengan adanya Fasilitas dan Pembinaan Industri serta Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	0	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	464.806.000,00	-	0,00	Belum Terlaksananya serta Meningkatnya Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	0	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Fasilitasi dan Pembinaan Industri								

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	184.576.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : IKM yang Mendapatkan Pendampingan/P enerapan Sertifikasi/Penge mbangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	148.230.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Output : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	132.000.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
16	Kementerian Perindustrian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	114.138.000,00	-	0,00	Belum Terpenuhinya Dukungan Manajemen Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	0	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	114.138.000,00	-	0,00	Belum Terlaksananya serta Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	0	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35.760.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78.378.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
17	Kementerian Perdagangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Perdagangan Dalam Negeri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	275.351.000,00	-	0,00	Belum Terwujudnya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	0	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	275.351.000,00	-	0,00	Belum Terlaksananya serta Meningkatnya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	0	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah								
			1. Rincian Kegiatan : Business Matching pada Pameran Pangan Nusa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	101.223.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : Dukungan Administrasi Satker	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.128.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
			3. Rincian Kegiatan : Perlindungan Konsumen di Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	128.000.000,00	-	0,00	-	0	APBN TA. 2025
18	Kementerian Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Program Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	446.008.000,00	440.116.650,00	98,68	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	446.008.000,00	440.116.650,00	98,68	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	446.008.000,00	440.116.650,00	98,68	2.00 Unit	100	APBN TA. 2025
19	Kementerian Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61.560.000,00	60.560.000,00	98,38	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61.560.000,00	60.560.000,00	98,38	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32.600.000,00	32.600.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.960.000,00	27.960.000,00	96,55	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
20	Kementerian Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.145.020.000,00	4.565.152.084,84	74,29	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.145.020.000,00	4.565.152.084,84	74,29	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Sarana Pengembangan Kawasan								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.581.020.000,00	2.001.187.238,00	77,53	6.00 Unit	100	APBN TA. 2025
			2. Output : Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								
			1. Rincian Kegiatan : Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.564.000.000,00	2.563.964.846,84	71,94	2.20 km	100	APBN TA. 2025
21	Kementerian Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Program Dukungan Manajemen	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.380.000,00	80.380.000,00	100,00	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025

No	Kementerian/Le mbaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.380.000,00	80.380.000,00	100,00	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN TA. 2025
		3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal								
			1. Rincian Kegiatan : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37.520.000,00	37.520.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
			2. Rincian Kegiatan : Layanan Perkantoran	Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.860.000,00	42.860.000,00	100,00	1.00 Layanan	100	APBN TA. 2025
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2025					37.672.049.000,00	21.743.898.803,00	57,72		71,56	APBN TA. 2025

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak ada Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Target Kinerja Tidak ada

3.2.2. Realisasi Tidak ada

3.3 Permasalahan dan Kendala

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Kapasitas Sumber Daya Manusia masih kurang memadai secara kualitas dibandingkan dengan permasalahan pada teknis pelaksanaan Kegiatan di lapangan;
 - b. Faktor Alam yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Adanya refocusing anggaran, Proses kegiatan berjalan, koordinasi dan inventarisasi BMN di Kab/Kota sedang dilaksanakan. Rapat pembahasan verval tingkat pusat telah diikuti secara online, perjalanan koordinasi statistik dalam daerah sedang dilaksanakan, kegiatan telah dilaksanakan dan dimanfaatkan, proses SPJ dan pelaporan.;
 - b. Tersedianya Kep Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Alokasi PB 2025 dan koordinasi ke beberapa kab, Rp 5.600.000 akan direvisi 3993.QAA Lock Pagu Rp 19.880.000,00. Adanya pengambilan sampel 7 sampel pupuk dan pestisida berserta uji sampelnya di provinsi dan kooordinasi kab/kota ke provinsi.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
 - b. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
 - b. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka;
 - c. Mengalami Blokir Anggaran pada Program Perdagangan Dalam Negeri sehingga Belum Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Kurangnya SDM dalam rangka Optimalisasi Program Transmigrasi dengan Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Masih rendahnya optimalisasi di bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang merupakan wadah untuk menciptakan koordinasi dengan mencari dan menggali potensi daerah untuk kemudian di kembangkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di wilayah kawasan transmigrasi tersebut.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Perlu adanya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Mengakselerasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
 - c. Mengoptimalkan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- a. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi dengan maksimal pada pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Mengoptimalkan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan.
- 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Disnaker dan Diknas Kabupaten/Kota terkait kebutuhan SDM dalam rangka mengotimalkan Program Transmigrasi dengan Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
 - a. Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi dengan menguatkan sarana dan prasarana di wilayah kawasan transmigrasi yang belum sepenuhnya tertata dengan baik dengan difokuskan pada dua sasaran, yakni sasaran fisik yakni infrastruktur dan sarana dasar serta non fisik yakni mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat yang berkualitas dan mandiri.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No .	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pendidikan Menengah	Orang	60.165	100
	SMA			
	1. Kemampuan Literasi	Nilai	78,42	100
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	66,2	100
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	84,31	100
	4. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,68	100
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,91	100
	SMK			
	1. Kemampuan literasi	Nilai	72,89	100
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	61,76	
	3. Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	82,86	100
	4. Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	79,54	100
	5. Indeks iklim keamanan	Nilai	70,73	100
	6. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	70,8	100
	7. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,51	100
III.	Pendidikan Khusus	Orang	911	100
	SDLB			
	1. Kemampuan Literasi	Nilai	73,17	100
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	68,33	100
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	66,97	100
	4. Indeks iklim kebinekaan	Nilai	68,29	100
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,17	100

	SMPLB				
	1.	Kemampuan Literasi	Nilai	70,91	100
	2.	Kemampuan numerasi	Nilai	71,09	100
	3.	Indeks iklim keamanan	Nilai	63,83	100
	4.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,55	100
	5.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,62	100
	SMALB				
	1.	Kemampuan Literasi	Nilai	81,58	100
	2.	Kemampuan numerasi	Nilai	76,34	100
	3.	Indeks iklim keamanan	Nilai	79,01	100
	4.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,57	100
	5.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	78,17	100

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

No .	Indikator Kinerja/Jenis Layanan		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
I.	URUSAN PENDIDIKAN						
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			99.50%
1.	Pendidikan Menengah			Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah			97,52
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	60.165	62.371	+2.206	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19,40
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	96,99
	SMA						
	1.	Kemampuan literasi	Nilai	78,42	85,18	+6,76	
	2.	Kemampuan numerasi	Nilai	66,2	80	+13,80	
	3.	Indeks iklim keamanan	Nilai	84,31	72,85	11,46	
	4.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,68	72,68	1,00	
	5.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,91	61,4	1,51	
	SMK						
	1.	Kemampuan literasi	Nilai	72,89	76,65	+3,76	
	2.	Kemampuan numerasi	Nilai	61,76	71,32	+9,56	
	3.	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	82,86	81,46	1,40	
	4.	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	79,54	72,54	7,00	
	5.	Indeks iklim keamanan	Persentase	70,73	69,53	1,20	

	6.	Indeks iklim kebinekaan	Persentase	70,8	69,5	1,30	
	7.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,51	57,21	2,30	
2.	Pendidikan Khusus			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus			99,60
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80 %			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			911	1406	+495	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19,60
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia	98,02
	SDLB						99,18
	1.	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,17	72,67	0,5	99,32
	2.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	68,33	67,32	1,01	98,52
	3.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,97	65,67	1,30	98,06
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	68,29	71,43	+3,41	100
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	66,17	85,7	+19,53	100
	SMPLB						96,52
	1.	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,91	69,7	1,21	98,29
	2.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	71,09	69,29	1,80	97,47
	3.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63,83	62,42	1,41	97,79
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	73,55	65,51	8,04	89,07
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	60,62	65,51	+4,89	100
	SMALB						98,34
	1.	Indeks iklim keamanan	Nilai	81,58	80	1,58	98,06
	2.	Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,34	85	+8,66	100
	3.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	79,01	77,7	1,31	98,34
	4.	Kemampuan literasi	Nilai	76,57	74,56	2,01	97,37
	5.	Kemampuan numerasi	Nilai	78,17	76,56	1,61	97,94

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan pendidikan sebesar **99,50 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pendidikan menengah realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,40 %. Sedangkan indikator pendidikan khusus, realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,60 %.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2025:

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan					
	1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah SMA		46.097.139.272	37.099.106.705	80,48
		Angka Partisipasi Sekola				
	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0,00
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4,626,456,220	3.443.086.890	74,42
	3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	519,414,000	0	0,00
	4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	1,370,000,000	14.884.154	1,09
	5	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	65,000,000	62.277.755	95,81
	6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	3,392,005,544	1.687.408.641	49,75
		Literasi				
	1	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,041,351,995	988.926.390	94,97
	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	14,256,400,000	13.055.800.000	91,58
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan /Pendidikan Khusus	Orang	387,671,800	379.210.770	97,82
	4	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	87,635,300	67.836.088	77,41
	5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	86,631,700	70.957.300	81,91
	6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	48,665,200	38.528.500	79,17
	7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	144,973,000	133.498.550	92,09
	8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00
	9	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	128,792,100	60.740.935	47,16
	10	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,122,441,779	718.551.421	64,02
		Numerasi				
	1	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1,041,351,995	988.926.390	94,97
	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	14,256,400,000	13.055.800.000	91,58
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah	Orang	387,671,800	379.210.770	97,82

			Menengah Atas/ Kejuruan/ Pendidikan Khusus				
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	87,635,300	67.836.088	77,41
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	48,665,200	38.528.500	79,17
		6	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	144,973,000	133.498.550	92,09
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Buku	0	0	0,00
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Satuan Pendidikan	1,122,441,779	718.551.421	64,02
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	86,631,700	70.957.300	81,91
		10	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	128,792,100	60.740.935	47,16
		Keamanan					
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	86,631,700	70.957.300	81,91
		2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	128,792,100	60.740.935	47,16
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	153,516,380	141.549.434	92,20
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	136,105,740	14.535.450	10,68
		Kebhinekaan					
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	86,631,700	70.957.300	81,91
		2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	128,792,100	60.740.935	47,16
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	153,516,380	141.549.434	92,20
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	136,105,740	14.535.450	10,68
		Inklusifitas					
		1	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	128,792,100	60.740.935	47,16
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	86,631,700	70.957.300	81,91
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	153,516,380	141.549.434	92,20
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	136,105,740	14.535.450	10,68
	2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			96.412.716.097	84.206.175.632	87,34
		Angka Partisipasi Sekolah					
		1	Pembangunan USB (Unit	Unit	0	0	0,00

			Sekolah Baru)				
		2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	2,791,840,000	2.388.733.650	85,56
		3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	400,000,000	0	0,00
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik	666,025,686	0	0,00
		5	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	36,677,100	28.972.805	78,99
		6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0,00
		7	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	545,000,000	0	0,00
			Literasi				
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	15,717,478,157	15.228.608.296	96,89
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	14,239,000,000	13.180.910.000	92,57
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	158,000,000	0	0,00
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	72,360,500	66.115.804	91,37
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	60,064,300	58.114.400	96,75
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	48,665,200	38.528.500	79,17
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0,00
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	3,229,358,117	2.080.778.423	64,43
		10	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63.349.345	30,70
			Numerasi				
		1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0,00
		2	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	72,360,500	66.115.804	91,37
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	14,239,000,000	13.180.910.000	92,57
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	48,665,200	38.528.500	79,17
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0,00
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	3,229,358,117	2.080.778.423	64,43
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	15,717,478,157	15.228.608.296	96,89
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan	Orang	158,000,000	0	0,00

			Khusus				
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	60,064,300	58.114.400	96,75
		10	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63.349.345	30,70
			Keamanan				
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	60,064,300	58,114,400	96,75
		2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63,349,345	30,70
		3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	97,311,300	79,315,000	81,51
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	882,741,000	696,973,753	78,96
			Kebhinekaan				
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	97,311,300	79.315.000	81,51
		2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	60,064,300	58.114.400	96,75
		3	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63.349.345	30,70
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	882,741,000	696.973.753	78,96
			Inklusivitas				
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	60,064,300	58.114.400	96,75
		2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63.349.345	30,70
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	882,741,000	696.973.753	78,96
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	97,311,300	79.315.000	81,51
			Kekhususan SMK				
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Peserta Didik	666,025,686	0	0.00
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	15,717,478,157	15.228.608.296	96.89
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	158,000,000	0	0.00
		4	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	206,363,365	63.349.345	30.70
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah	Satuan Pendidikan	882,741,000	696.973.753	78.96

			Kejuruan				
		6	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	1,740,545,930	1.673.470.753	96.15
		7	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	0	0	0.00
		8	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	0	0	0.00
		9	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	1,400,000,000	0	0.00
	3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus			14.849.254.973	11.459.642.638	77,17
		Angka Partisipasi Sekolah					
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00
		2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	263,077,000	0	0.00
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta Didik	488,069,000	444,762,800	91.13
		4	Koordinasi. Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	45,733,550	31,886,900	69.72
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0.00
		6	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,608,980,000	1,501,149,247	93.30
		Literasi					
		1	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	85,575,000	79,806,600	93.26
		2	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	552,500,000	0	0.00
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	2,192,400,000	2,027,100,000	92.46
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	77,713,800	25,073,700	32.26
		6	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	72,360,500	66,115,804	91.37
		7	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	52,220,300	35,973,500	68.89
		8	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	41,331,700	39,662,037	95.96
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,085,558,800	1,017,320,445	93.71
		10	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	139,977,369	121,632,433	86.89
		Numerasi					
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	552,500,000	0	0.00
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	77,713,800	25,073,700	32.26
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	2,192,400,000	2,027,100,000	92.46
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi. Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	72,360,500	66,115,804	91.37

	5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	41,331,700	39,662,037	95.96
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,085,558,800	1,017,320,445	93.71
	7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	85,575,000	79,806,600	93.26
	8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	52,220,300	35,973,500	68.89
	9	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	139,977,369	121,632,433	86.89
	Keamanan					
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	52,220,300	35,973,500	68.89
	2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	139,977,369	121,632,433	86.89
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1,002,359,626	705,599,652	70.39
	4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	86,816,200	22,285,966	25.67
	Kebhinekaan					
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	52,220,300	35,973,500	68.89
	2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	139,977,369	121,632,433	86.89
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1,002,359,626	705,599,652	70.39
	4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	86,816,200	22,285,966	25.67
	Inklusifitas					
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	52,220,300	35,973,500	68.89
	2	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	139,977,369	121,632,433	86.89
	3	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan. kekerasan. dan intoleransi	Kegiatan	86,816,200	22,285,966	25.67
	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	1,002,359,626	705,599,652	70.39
	4.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		260,520.600	157,504.542	60.46
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	67,331,900	39,947,620	59.33
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	193,188,700	117,556,922	60.85

		Pendidikan Khusus				
	5.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah		300.655.200	171.648.700	57,09
		1 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku	300,655,200	171,648,700	57.09
				157.920.286.142	133.094.078.217	84.28

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2025, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	3.603
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	174

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat kendala dalam pengumpulan data karena data sudah tersedia di Dapodik dan Raport Pendidikan. Akan tetapi jumlah anggaran dan realisasi anggaran SPM lebih kecil karena efesiensi anggaran.

4.2 Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Orang	70	100
	Pra Krisis Kesehatan			
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	25	100
	2. Tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	3	
	3. Sarana dan prasarana	Unit	2	100
	Tahap Tanggap Darurat			
	1. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	55	100
	2. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	1	100
	3. Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	2	100
	4. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	12	100
	5. Tenaga medis : Dokter	Orang	1	100
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	4	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	100
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	4	100
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	6	100
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	1	100
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	5	100
	12. Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1	100
II.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi atau berpotensi KLB	Orang	50	100
	Berpotensi KLB			
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	37	100
	2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	50	100
	3. Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	6	100
	4. Tempat sampai biologis	Unit	7	100
	5. Formulir: Form Penyelidikan	Formulir	10	100

		Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan			
	6.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung. Pot. Media Amies. dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	10	100
	7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop. Termometer Badan. Tensimeter. Senter. Test Diagnosis Cepat. dll)	Unit	5	100
	8.	Tenaga Medis : Dokter	Orang	5	100
	9.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	8	100
	10.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	4	100
	11.	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	100
	12.	Tenaga Laboratorium	Orang	5	100
	13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	6	100
	14.	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	9	100
	Kondisi Terjadi KLB				
	1.	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	5	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
II.	Urusan Kesehatan					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.51
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	70	70	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM		Jumlah	Jumlah	Jumlah	100

			yang Harus Dilayani	Total Terlayani	yang Belum Terlayani		
	PRA KRISIS KESEHATAN						
	1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	25	25	0	100
	2.	Tenaga medis. tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	3	3	0	100
	3.	Sarana dan prasarana	Unit	2	2	0	100
	TAHAP TANGGAP DARURAT						
	1.	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	55	55	0	100
	2.	Tenaga medis. tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan	Orang	1	1	0	100
	3.	Sarana dan prasarana	Unit	2	2	0	100
	4.	Tahap Tanggap Darurat		12	12	0	100
	5.	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	1	4	+3	100
	6.	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI	Orang	4	4	0	100
	7.	Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Enegi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	3	8	+5	100
		Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	4	4	0	100
		Tenaga medis : Dokter	Orang	6	6	0	100
		Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1	1	0	100
		Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	5	5	0	100
		Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	1	1	0	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			99,03	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80	
	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	50	50	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					19,03	
	Jumlah Muti Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100	
	1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit	37	10	27	27.03
	2.	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit	50	50	0	100
	3.	Wadah pengiriman specimen (Specimen Carrier)	Unit	6	6	0	100
	4.	Tempat sampai biologis	Unit	7	4	3	57.14
	5.	Formulir: Form Penyelidikan Epidemiologi Form/Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan	Formulir	10	8	2	80.00
	6.	Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung. Pot. Media Amies. dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit	Unit	10	10	0	100
	7.	Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop. Termometer Badan. Tensimeter.Senter. Test Diagnosis Cepat. dll)	Unit	5	5	0	100

	8.	Tenaga Medis : Dokter	Orang	5	5	0	100
	9.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	8	8	0	100
	10.	Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	4	4	0	100
	11.	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	1	1	0	100
	12.	Tenaga Laboratorium	Orang	5	5	0	100
	13.	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	6	6	0	100
	14.	Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	9	9	0	100
	KONDISI TERJADI KLB						
	1.	Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit	Orang	5	5	0	100

Berdasarkan tabel di atas. indeks pencapaian SPM urusan kesehatan sebesar **99,51 %** dengan kategori **tuntas utama**. Untuk indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100 %. Sedangkan indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 99,03 %.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2025.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
	a.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	6.942.300	2.169.335	31,35
	b.	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	2.598.200	1.368.185	52,66

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan Tahun 2025, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	55 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- Belum optimalnya pelaporan Kabupaten/Kota.
- Masih kekurangan anggaran untuk SPM.
- Masih kekurangan tenaga kesehatan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Satuan	Target	Persentase Target
I.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota		orang	0	100
	1.	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	rupiah	0	100
	2.	Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	7	100
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		orang	0	100
	1.	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	rupiah	0	100
	2.	Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	7	100

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
III.	Urusan Pekerjaan Umum					
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Madya			85,71
I.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			78,57
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN		Jumlah Total yang	Jumlah Total yang	Jumlah Total yang	80

	DASAR (80%)		Harus Dilayani	Terlayani	Belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Terlayani	Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					57,14
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100
	2. Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	7	1	0	14,29
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota			92,86
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Terlayani	Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					85,71
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100
	2. Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	7	5	2	71,43

Berdasarkan tabel di atas. indeks pencapaian SPM urusan pekerjaan umum sebesar **85,71 %** dengan kategori **Tuntas Madya**. Untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 78,57 %. Sedangkan indikator penyediaan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 92,86 %.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2025.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		123.559.600	91.756.000	74.26
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		123.559.600	91.756.000	74.26
	1. Penyusunan rencana. kebijakan. strategi dan teknis SPAM	Dokumen	-	-	-
	2. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	-	-	-
	3. Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	-	-	-
	4. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
	5. Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	-	-	-
	6. Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	-	-	-
	7. Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
	8. Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	-	-	-
	9. Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
	10. Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
	11. Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	-	-	-
	12. Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	-	-	-
	13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	-	-	-
	14. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
	15. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	98.919.300	77.646.500	78.49
	16. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	24.640.300	14.109.500	57.26
	17. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-
	18. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	-	-	-

		19	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	-	-	-
		20	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-
		21	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
2.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		7,942,817,160	7,781,697,950	97.97
	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		7,942,817,160	7,781,697,950	97.97
		1.	Penyusunan rencana. kebijakan. strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		2.	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	-	-	-
		3.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	-	-	-
		4.	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	-	-	-
		5.	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	-	-	-
		6.	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	-	-	-
		7.	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	-	-	-
		8.	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
		9	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	-	-	-
		10	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari	-	-	-
		12	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	-	-	-
		13	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari	-	-	-
		14	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	7.785.071.100	7.692.674.950	98,81
		15	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	157.746.060	89.023.000	56,43
		16	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	-	-	-
		17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	-	-	-
		18	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	-	-	-
TOTAL					8.066.376.760	7.873.453.950	97.61

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2025, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	PNS 9 orang P3K 11 orang PHL 1 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	PNS 9 orang P3K 11 orang PHL 1 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki SPAM regional dan SPALD regional, sehingga capaian SPM untuk masyarakat yang berada di lintas Kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terkendala beberapa hal seperti kondisi geografis (sumber air baku) di Bangka Belitung. Prioritas untuk SPAM saat ini adalah meningkatkan capaian SR dan perluasan jaringan SPAM Perpipaan. Untuk itu Pemerintah provinsi pada Tahun 2025 telah melakukan upaya bantuan kepada pemerintah kabupaten berupa Kegiatan Pembinaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya Kegiatan Penyediaan Prasarana Jamban Sehat untuk Pemicuan PHBS dari Intervensi Penurunan Stunting di 5 (lima) Kabupaten (Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur) sebanyak 333 unit. Adapun kegiatan pembangunan ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan capaian SPM kabupaten bagi masyarakat dan sekaligus menjadi capaian SPM provinsi.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi		Orang	0	100
	1.	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	0	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Orang	0	100
	1.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Rumah	0	100
	2.	Subsidi uang sewa	Rumah	0	100
	3.	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	0	100

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output	Total Pencapaian (Persentase) %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA	100

IV. Urusan Perumahan Rakyat						
I.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Orang	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR 80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1. Melakukan pengumpulan data. perhitungan kebutuhan. dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/Kota	0	0	0	100
II.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi			100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	0	0	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)					20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100
	1. Melakukan pengumpulan data. perhitungan kebutuhan. dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	100

Dengan tidak terjadinya bencana provinsi dan juga tidak adanya program pemerintah yang menyebabkan terjadinya relokasi, maka sesuai tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan perumahan rakyat sebesar **100%** dengan kategori **tuntas paripurna**.

Untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100%. Sedangkan indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang

terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi realisasi capaian SPM berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 100 %.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2025

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Perumahan			-	-	-
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		-	-	-
		1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	-	-	-
		3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	-	-	-
		4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	-	-	-
		5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	-	-	-
		7. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		8. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		9. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
		10. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah	Dokumen	-	-	-

			bagi Korban Bencana Provinsi				
		11.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	-	-	-
	2.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			-	-
		1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		2.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	-	-	-
		3.	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	-	-	-
		4.	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		5.	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		6.	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		7.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga	-	-	-
		8.	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		9.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		10.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		11.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
		12.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	-	-	-
TOTAL					-	-	-

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6 orang PNS 2 orang PHL
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagimasyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	6 orang PNS 2 orang PHL

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Persentase Target
I.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	5	100
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	245	100
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	dokumen	10	100
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	250	100
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	100
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	100
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	100

4.5.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian (Persentase) %
V.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA	96.67
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	96.28

			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN (80%)					
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	5	5	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					16.67
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	83.33
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	245	246	+1	100
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	10	10	0	0
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	250	250	0	100
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	0	100
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	100

Berdasarkan tabel di atas. indeks pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum sebesar **96.67 %** dengan kategori **tuntas utama**. Capaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar capaiannya sebesar 96.67 %.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)			4,832,266,500	2,350,112,245	48.63
	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		4,641,984,800	2,230,014,125	48.04
		1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. Pembinaan dan penyuluhan. Pelaksanaan patroli. Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	1,756,397,200	1,568,784,896	89.32
		2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	69,794,000	15,965,000	22.87
		3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	26,125,000	24,158,045	92.47
		4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	45,489,500	0	89.57
		5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	98,077,350	92,885,484	94.71
		6. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	0	0	0
		7. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	554,094,000	476,500,000	86.00
		8. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0
		9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	15,621,500	0	0
		10. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	0	0	0
		11. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0
		12. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0
		13. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Unit	0	0	0
		14. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0
		15. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0
		16. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	53,489,500	51,720,700	96.69
		17. Pencegahan Gangguan	Laporan	1,860,025,400	0	55.07

			Ketenteraman .Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini. Pembinaan dan Penyuluhan. Pelaksanaan Patroli. Pengamanan. dan Pengawasan				
		18.	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	93,077,350	0	49.48
		19.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	69,794,000	0	18.21
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			158,184,000	90,066,010	56.94
		1.	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	34,590,950	26,864,620	77.66
		2.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	74,208,900	35,693,300	48.10
		3.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		4.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan. Gelar Perkara. dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0
		5.	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		6.	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	0	0	0
		7.	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0
		8.	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
		9.	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	49,384,150	27,508,090	55.70
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			32,097,700	30,032,110	93.56
		1.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	32,097,700	30,032,110	93.56
		2.	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah. Dukungan pelaksanaan sidang ditempat. Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0
		3.	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0
		4.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
		5.	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0
		6.	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan	0	0	0
TOTAL					4,832,266,500	2,350,112,245	48.63

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	76 orang PNS 1 orang CPNS 27 orang P3K

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM urusan trantibumlinmas adalah sulitnya menghitung target capaian SPM dalam tahapan penghitungan kebutuhan, dikarenakan indikatornya bersifat respon kasus.

4.6 Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana

provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Persentase Target (%)
I.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Orang	31	100
1.	Penyediaan Permakanan	Orang	31	100
2.	Penyediaan Sandang	Orang	31	100
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	4	100
4.	Penyediaan alat bantu	Orang	26	100
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	31	100
6.	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial	Orang	195	100
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	35	100
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	23	100
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	100
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	12	100
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	14	100
II.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Orang	60	100
1.	Pengasuhan	Orang	3	100
2.	Penyediaan Permakanan	Orang	60	100
3.	Penyediaan Sandang	Orang	38	100
4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	42	100
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	47	100
6.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual dan Sosial	Orang	200	100
7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	29	100
8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran. Nomor Induk Kependudukan. dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	100
9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	55	100
10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	100

	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	100
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	100
III.	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		Orang	30	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	30	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	32	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	3	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	24	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	32	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual dan Sosial	Orang	180	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	65	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	100
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	3	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	100
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	3	100
	12.	Pemulasaran	Orang	4	100
IV.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		Orang	28	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	28	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	28	100
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	8	100
	4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	28	100
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual & Sosial	Orang	30	100
	6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	10	100
	7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	7	100
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Kartu Tanda Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	2	100
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	100
	10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	100
V.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi		Orang	100	100
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	100	100
	2.	Penyediaan sandang	Orang	19	100
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan	Unit	2	100

		Pengungsi			
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	15	100
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	20	100

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
VI.	Urusan Sosial						
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			87,30
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			96,12
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			31	37	+6	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						16,12
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80,61
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	31	37	+6	100
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	31	37	+6	100
	3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	4	4	0	100
	4.	Penyediaan alat bantu	Orang	26	6	20	23,08
	5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	31	37	+6	100
	6.	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial	Orang	195	176	19	90,26
	7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	35	41	+6	100
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	23	5	18	21,74
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	3	2	60
	10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	12	11	1	91,67
	11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	14	14	14	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Jumlah Anak Terlantar di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			96,67
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			60	260	0	100

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						16,67
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83,33
	1.	Pengasuhan	Orang	3	3	0	100
	2.	Penyediaan Permakanan	Orang	60	60	0	100
	3.	Penyediaan Sandang	Orang	38	38	0	100
	4.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	42	42	0	100
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	47	47	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual dan Sosial	Orang	200	200	0	100
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	29	29	0	0
	8.	Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran. Nomor Induk Kependudukan. dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	55	55	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	0	0	0	0
	12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	0	0	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di dalam Panti			Jumlah Lanjut Usia Terlanter di Dalam Panti Sosial			74,79
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	61,33
	Jumlah yang Harus Dilayani			30	23	7	76,67
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						13,46
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	67,30
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	30	23	7	76,67
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	32	25	7	78,13
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	3	3	0	100
	4.	Penyediaan Alat bantu	Orang	24	17	7	70,83
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	32	19	13	59,38
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual dan Sosial	Orang	180	123	57	68,33
	7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Orang	65	58	7	89,23
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100
	9.	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	3	3	0	100
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	2	3	40
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	3	0	3	0

	12.	Pemulasaran	Orang	4	1	3	25
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			73,21
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80 %)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	60
	Jumlah yang Harus Dilayani			28	21	7	75
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						13.21
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.07
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	28	21	7	75
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	28	19	9	67,86
	3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Unit	8	0	8	0
	4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	Orang	28	19	9	67,86
	5.	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual & Sosial	Orang	30	30	0	100
	6.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari	Orang	10	3	+1	100
	7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang	10	0	10	0
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Kartu Tanda Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	2	0	2	100
	9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	4	+2	100
	10.	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	5	5	50
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Provinsi			Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya			95,69
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani			100	100	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 %)						15,69
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	78,46
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	100	100	0	100
	2.	Penyediaan sandang	Orang	19	15	4	78,95
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	2	1	0	50
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	15	11	4	73,33
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	20	18	2	90

Berdasarkan tabel di atas, indeks pencapaian SPM urusan sosial sebesar **87,30 %** dengan kategori **tuntas madya**. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 87,30 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 96,67 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 74,79 %. Capaian SPM untuk indikator rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 73,21 %. Capaian SPM untuk indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi berdasarkan bobot persentase pencapaian penerima layanan dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 95,69 %.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2025.

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Rehabilitasi Sosial				1.762.962.915	1.382.051.333	78,39
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti			870.684.321	750.934.178	86.25
		1.	Penyediaan permakanaan	Orang	392,632,100	353,213,624	89.96
		2.	Penyediaan sandang	Orang	74,367,600	65,889,150	88.60
		3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	9,751,200	7,315,000	75.02
		4.	Penyediaan alat bantu	Orang	13,684,900	13,036,951	95.27
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	57,093,721	38,089,872	66.71
		6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	223,959,100	203,534,381	90.88
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	28,014,200	26,253,600	93.72
		8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	7,198,400	2,877,900	39.98
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5,983,600	1,980,000	33.09
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	18,000,000	14,825,000	82.36

		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	18,000,000	16,508,700	91.72
		12.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	21,999,500	7,410,000	33.68
	2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			333.256.672	233,876,483	70.18
		1.	Pengasuhan	Orang	73,595,000	54,330,000	73.82
		2.	Penyediaan makanan	Orang	38,523,200	24,563,233	63.76
		3.	Penyediaan sandang	Orang	27,160,800	23,050,250	84.87
		4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	27,470,400	26,440,200	96.25
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	18,291,372	7,692,300	42.05
		6.	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial	Orang	53,189,000	23,252,400	43.72
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	17,933,400	13,889,400	77.45
		8.	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran. Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	27,846,500	20,757,000	74.54
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
		12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	0	0	0
		13.	Koordinasi. sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	49,247,000	39,901,700	81.02
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			377.613.246	295,968,477	78.38
		1.	Penyediaan permakanan	Orang	165,642,200	132,969,569	80.28
		2.	Penyediaan sandang	Orang	44,313,700	38,991,070	87.99
		3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	5,952,500	5,513,700	92.63
		4.	Penyediaan alat bantu	Orang	17,178,900	12,700,621	73.93
		5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	41,988,746	26,801,057	63.83
		6.	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial	Orang	31,094,000	30,492,950	98.07
		7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	27,610,000	23,060,858	83.52
		8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	5,990,100	4,396,046	73.39
		9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5,843,100	5,353,106	91.61
		10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4,000,000	2,810,000	70.25
		11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4,000,000	0	0
		12.	Pemulasaraan	Orang	12,000,000	3,000,000	25.00
		13.	Koordinasi. sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	12,000,000	9,879,500	82.33

	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		181.408.676	101,272,195	55.83
	1.	Penyediaan permakanaan	Orang	52,125,000	24,944,765	47.86
	2.	Penyediaan sandang	Orang	14,139,400	5,791,425	40.96
	3.	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	3,047,500	0	0
	4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	7,564,476	699,3	9.24
	5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	22,720,900	14,849,745	65.36
	6.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	5,962,000	0	0
	7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	38,992,500	36,162,015	92.74
	8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	500	0	0
	9.	Akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	3,442,800	0	0
	10.	Pemulangan ke daerah asal	Orang	16,000,000	3,051,000	19.07
	11.	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	16,914,100	15,773,945	93.26
2.	Program Penanganan Bencana			485.140.700	432.356.752	89.12
	5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		485,140,700	432,356,752	89.12
	1.	Penyediaan Permakanan	Orang	100,335,000	69,085,000	68.85
	2.	Penyediaan Sandang	Orang	15,941,700	11,755,193	73.74
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	39,312,500	28,846,240	73.38
	4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	19,480,900	16,568,518	85.05
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	310,070,600	306,101,801	98.72
TOTAL				2,248,103,615	1.814.408.085	80.71

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2024, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	PNS 16 orang P3K 17 orag
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	PNS 10 orang P3K 8 orang

3.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	PNS 11 orang P3K 7 orang
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	PNS 12 orang P3K 6 orang
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	PNS 5 orang P3K 21 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan yang berfokus pada akurasi data, keterbatasan fasilitas, dan dinamika ekonomi lokal.

Berikut rincian permasalahan utama berdasarkan evaluasi dan dokumen perencanaan tahun 2025:

1. Masalah validitas dan sinkronisasi data
 - a. Akurasi DTKS: Masih ditemukan ketidaksesuaian antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini memicu kesulitan dalam memastikan bantuan sosial dalam kerangka SPM tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - b. Pemutakhiran Data: Meskipun regulasi baru seperti Pergub Nomor 3 Tahun 2025 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan telah mewajibkan pemutakhiran data secara berkala, implementasi di tingkat desa seringkali terkendala oleh kapasitas SDM dan infrastruktur sistem informasi terpadu
2. Kesenjangan antara kebutuhan dan fasilitas layanan
 - a. Tingginya Laporan RTLH: Pada tahun 2025, tercatat lebih dari 50 laporan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masuk, namun keterbatasan alokasi anggaran menghambat percepatan penanganan yang masuk dalam standar pelayanan dasar.
 - b. Fasilitas Rehabilitasi: Keterbatasan panti atau balai rehabilitasi sosial milik daerah untuk menampung kluster disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar memaksa pemerintah daerah sangat bergantung pada balai milik pusat (Kemensos)

3. Tekanan ekonomi dan inflasi
 - a. Kenaikan Garis Kemiskinan: Per Maret 2025, garis kemiskinan per rumah tangga di Babel naik menjadi Rp4.736.323/bulan (meningkat 7,84% dari periode sebelumnya). Kenaikan ini meningkatkan jumlah penduduk yang masuk dalam kriteria penerima SPM, sehingga beban anggaran daerah semakin berat.
 - b. Inflasi Pangan: Inflasi yang dipicu harga komoditas pangan (cabai, sayuran) pada akhir 2025 menekan daya beli kelompok rentan, yang berisiko meningkatkan angka kemiskinan baru dan menambah daftar antrean layanan sosial
4. Kendala operasional dan regulasi
 - a. Infrastruktur Inklusif: Masih terdapat tantangan dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas (seperti akses informasi braille dan sarana fisik) sesuai mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menjadi bagian dari penilaian mutu SPM.
 - b. Integrasi Pelaporan: Kendala teknis dalam pengisian aplikasi pelaporan SPM dari pusat (Kemendagri) terkadang menghambat pencapaian target administratif yang tepat waktu.
 - c. Adanya kebijakan rasionalisasi/refocussing anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan serta prognosis rencana penyerapan anggaran sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/0583/BAKUDA tanggal 29 September 2025, sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Sekolah

 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 3. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di

Bidang Pendidikan

6. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Literasi

1. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
10. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Numerasi

1. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
6. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Keamanan

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah

Atas

4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Kebhinekaan

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus

Inklusifitas

1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
2. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Angka Partisipasi Sekolah

1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2. Pembangunan Ruang Praktik Siswa
3. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
6. Pembangunan Ruang Kelas Baru
7. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

Literasi

1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
9. Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Numerasi

1. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
2. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
5. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
9. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Keamanan

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

Kebhinekaan

1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
2. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
3. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

Inklusifitas

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah

Kejuruan

4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Kekhususan SMK

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus
2. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
8. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
9. Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik

3. Pengelolaan Pendidikan Khusus

Angka Partisipasi Sekolah

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
4. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
5. Pembangunan Ruang Kelas Baru
6. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah

Literasi

1. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
3. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
6. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
7. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
8. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
9. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk

Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Numerasi

1. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Keamanan

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Kebhinekaan

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus
4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Inklusifitas

1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan
2. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah

1. Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi

4.7.2 **Urusan Kesehatan**

Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

4.7.3 **Urusan Pekerjaan Umum**

Penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 1. Penyusunan rencana. kebijakan. strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional
 1. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 2. Penyusunan rencana. kebijakan. strategi dan teknis

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Tidak ada program, kegiatan atau sub kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Perumahan Rakyat.

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. Pembinaan dan penyuluhan. Pelaksanaan patroli. Pengamanan dan Pengawalan
2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi
4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
7. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
8. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9. Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui

- Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 10. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 11. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 3. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
- 3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

4.7.6 **Urusan Sosial**

Penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial dilaksanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Program Rehabilitasi Sosial
 - I. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Pantti
 - 1. Penyediaan permakanan
 - 2. Penyediaan sandang
 - 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - 4. Penyediaan alat bantu
 - 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam pantti
 - 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas
 - 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

12. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
- II. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
1. Pengasuhan
 2. Penyediaan makanan
 3. Penyediaan sandang
 4. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 9. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- II. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang
 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses
 4. Penyediaan alat bantu
 5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial
 6. Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual dan sosial
 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas
 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 12. Pemulasaraan
 13. Koordinasi. sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti
- IV Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1. Penyediaan permakanan
 2. Penyediaan sandang

3. Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses
4. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti
5. Pemberian bimbingan fisik. mental. spritual dan sosial
6. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
9. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
10. Pemulangan ke daerah asal
11. Koordinasi. sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti

B. Program Penanganan Bencana

V. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
5. Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-2.1.7-109 Tahun 2026 melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan pembaharuan pada sistem tersebut dengan tujuan agar seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif;
2. Terkait dengan pengumpulan elemen data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah serta unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya;
3. Pada penyusunan LPPD tahun 2025 ini jumlah IKK sebanyak 111 yang penginputan fokus pada IKK Outcome saja dan data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih spesifik serta menyeluruh terhadap kondisi penyelenggaraan Pemerintahan.

5.2. Saran

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2025 khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat;
2. Pembaharuan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang di miliki oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempermudah sebagai penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Terkait dengan sumber data yang tertuang dalam LPPD semoga dapat di jadikan basis data oleh Pemerintah Pusat dalam implemementasi kebijakan serta sasaran strategis guna mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera”**.